

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025 - 2029



**Dinas Koperasi, UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba**

Komplek Perkantoran Simanjalo,
Jl AB Silalahi, Ds Sianipar Sihail-hail, Balige

KATA PENGANTAR

Atas berkat Tuhan Yang Maha Esa serta didorong oleh semangat pengabdian untuk lebih meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas pembangunan Kabupaten Toba, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Renstra ini adalah merupakan salah satu bagian dari substansi perencanaan strategis Kabupaten Toba.

Penyusunan Renstra ini tidak terlepas dari dokumen induk perencanaan yang sudah ada baik di tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Dokumen ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Renstra ini memuat tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai perangkat daerah dalam jangka menengah, untuk mendukung pencapaian visi dan misi daerah yaitu **“Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya, dan Berkelanjutan Pembangunanya”**. Strategi dan kebijakan yang dilakukan guna mencapai hal tersebut juga tertuang dalam dokumen ini berikut rencana program/kegiatan dan indikasi pendanaannya.

Dalam hal ini maka diperlukan kesiapan, kemampuan, dan profesionalisme aparatur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang dilandasi sikap mental, disiplin, dan konsisten terhadap perencanaan yang telah ditetapkan, dapat melaksanakan tugas pengabdian dengan sebaik-baiknya dengan harapan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Toba.

Balige, 2025
Kepala Dinas Koperasi UKM,
Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba

Drs. SALOMO. H.K. SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680601 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Renstra PD Tahun 2025 - 2029

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 –
2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merupakan suatu Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2020 memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan selama 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025- 2029.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk melaksanakan pembangunan dalam waktu jangka menengah, setiap Organisasi Perangkat daerah (OPD) wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra), yaitu Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis disusun sebagai penjabaran atas Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan acuan dasar dalam penentuan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Perangkat Daerah disertai dengan kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam rangka memasuki periode pembangunan jangka menengah tahun 2025 -2029, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba menyusun Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029. Rencana Strategis ini mengacu pada Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 yang berisikan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah 5 (lima) tahun berdasarkan penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Toba untuk Masa Jabatan 2025 – 2029.

Selanjutnya dengan telah dirumuskannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029, dengan visinya adalah **“Toba Mantap 2029, Maju Daerahnya Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”**, dan misi yang diemban Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah **“Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan Berbasis Potensi Daerah dan Mendukung Kemandirian Daerah” (Misi 3).**

Penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba untuk Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum Penyusunan Renstra Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 11 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- 12 Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
- 22 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 23 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 76);

- 24 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 33);
- 25 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor);
- 27 Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Toba Samosir Nomor 25 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Samosir;

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan dan program strategis dengan skala prioritas yang lebih terarah merupakan indikator perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan;
2. Dasar dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DPA) dan Penetapan dan Laporan Kinerja;

3. Menjadi acuan bagi instansi terkait dalam mendukung pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Toba.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam melaksanakan pembangunan koperasi, usaha kecil menengah, perdagangan dan perindustrian di Kabupaten Toba sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Bupati dan Wakil Bupati Toba periode 2025 – 2029;
2. Menjaga eksistensi organisasi dan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan mengenai rencana penggunaan sumber daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta menjabarkan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025 – 2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029 disusun secara sistematis ke dalam naskah dengan sistematika penulisan terdiri dari 5 (lima) BAB, secara garis besar tiap – tiap bab menguraikan hal – hal sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan.

1.1 Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025 – 2029 berupa Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025 – 2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD.

1.2 Landasan Hukum

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025 – 2029, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

1.3 Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun 2025 -2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing – masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025 -2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian – capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan – hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1 Gambaran Pelayanan dan Struktur Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkasan tentang macam sumber daya yang dimiliki perangkat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja perangkat daerah berdasarkan sasaran/target Renstra perangkat daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indikator lainnya.

2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Perangkat daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan perangkat daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah

2.2.2 Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- 4.1. Uraian Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
- 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan daerah
- 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
- 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V PENUTUP

Menjelaskan dengan singkat definisi, fungsi dan peran dari dokumen Renstra

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir menjelaskan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merupakan salah satu Dinas Daerah dalam kedudukannya pada organisasi Pemerintah Kabupaten Toba.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba mengacu kepada Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/PER/M.KUKM/X/2016 Tahun 2016 tentang tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Perindustrian.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah

1. KEPALA DINAS

a. Tugas

1. memimpin dan mengordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

2. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan Pasar Rakyat, dan Perindustrian serta kelompok jabatan fungsional;
3. mengembangkan dan melaksanakan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD/UKPD, instansi pemerintah, swasta dan/atau pihak ketiga lainnya dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
4. menyelenggarakan penetapan penyusunan perencanaan dan program kegiatan dinas di bidang koperasi, Usaha Mikro dan Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
5. menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
6. menyelenggarakan kebijakan umum di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
7. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian program di bidang koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
8. menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria dalam penyelenggaraan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
9. menyelenggarakan kebijakan umum di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
10. menyelenggarakan fasilitasi pengembangan dan pengendalian program di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;

11. menyelenggarakan koordinasi dan evaluasi di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
12. menyelenggarakan bimbingan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan dan peningkatan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan ketatausahaan/ administrasi di lingkungan dinas;
14. menyelenggarakan penetapan inventarisasi permasalahan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
15. menyelenggarakan verifikasi urusan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
16. menyelenggarakan pembinaan dan pemberdayaan di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
17. menyelenggarakan penetapan pertimbangan pemberian rekomendasi di bidang koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), perdagangan, perindustrian dan pasar rakyat;
18. menetapkan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di kabupaten;
19. menetapkan penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan di kabupaten;
20. menyusun rencana dan program kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
21. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

22. menetapkan SKP PNS di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
23. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
24. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
25. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

2. SEKRETARIS

- a. Tugas
melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
- b. Fungsi
- c. pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana strategis, program, kegiatan, dan anggaran serta tugas pembantuan di bidang Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
- d. pengelolaan kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- e. pengelolaan data dan informasi di bidang Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Perdagangan dan Perindustrian;
- f. pengkoordinasian dan pelaksanaan kerjasama di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
- g. pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian sesuai dengan lingkup tugasnya;
- h. pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;

- i. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga, bahan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta hubungan masyarakat;
- j. pengelolaan keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan;
- l. pengelolaan perlengkapan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian diluar prasarana dan sarana Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian;
- m. pengkoordinasian penyusunan laporan asset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian; dan
- o. pelaporan dan pertanggungjawaban tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

3. KEPALA BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)

- a. Tugas
 - melaksanakan kegiatan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah
- b. Fungsi
 - 1. menyusun, menyiapkan, menetapkan, dan/atau melaksanakan kebijakan umum tentang koperasi, penumbuhan iklim usaha, pengembangan usaha, pembiayaan dan penjaminan dan kemitraan;
 - 2. menyusun Rencana dan Program Kerja Tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 3. melakukan verifikasi data dan jumlah koperasi, simpan pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;

4. mengkoordinasikan dan memverifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam;
5. mengkoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi;
6. mengkoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
7. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah;
8. mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan perlindungan koperasi, usaha mikro kecil menengah;
9. menyelenggarakan promosi akses pasar bagi produk koperasi, usaha mikro kecil menengah di tingkat lokal dan nasional;
10. mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
11. mengkoordinasikan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha mikro menjadi usaha kecil dan pengembangan kewirausahaan;
12. mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis anggota koperasi;
13. mengkoordinasikan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
14. mengkoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi perangkat organisasi koperasi;
15. melaksanakan seluruh kewenangan-kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
16. melakukan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahannya;
17. menetapkan SKP Pejabat yang dibawahinya;
18. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
19. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

4. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

a. Tugas

Melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, dan kemetrolagian.

b. Fungsi

1. melaksanakan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
2. melakukan pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan;
3. memberikan rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non perizinan usaha perdagangan;
4. memeriksa fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya;
5. melaksanakan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
6. menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
7. memantau distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
8. melakukan koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
9. memantau harga dan stok pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
10. menyediakan data dan informasi harga serta ketersediaan stok;
11. melakukan koordinasi dengan stakeholders untuk penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah;

12. mengawasi pengadaan dan penyaluran kebutuhan pokok dan barang penting lainnya;
13. melaksanakan pengawasan, pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi;
14. melakukan koordinasi dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten (KP3K), produsen, distributor, dan pengecer;
15. melakukan penyelenggaraan dan partisipasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal;
16. melaksanakan penyediaan layanan informasi mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
17. melakukan penyelenggaraan dan partisipasi dalam kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas daerah kabupaten/kota);
18. melaksanakan penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perdagangan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPJB) dan Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN), Jabatan Fungsional Penera, pengamat tera dan pengawas kemetrolagian;
19. menyediakan dan melaksanakan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolagian;
20. menyiapkan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatang fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolagian;
21. melaksanakan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera;
22. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu.;

23. melaksanakan pengawasan dan pembinaan mutu produk/komoditi;
24. memetakan potensi komoditi daerah;
25. melakukan monitoring mutu produk komoditi ekspor;
26. melaksanakan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
27. melakukan registrasi pelaku usaha komoditi ekspor;
28. melakukan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
29. membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya;
30. menetapkan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pejabat yang dibawahinya;
31. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

a. Tugas

melaksanakan kegiatan Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral.

b. Fungsi

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. penyusunan rencana dan Program Tahunan di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
3. perumusan Konsep kebijakan Teknis di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
4. pelaksanaan Penjajakan dan Pendataan di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
5. monitoring dan pengevaluasian Usaha Industri dan Energi Sumber Daya Mineral yang di daerah binaan yang ditetapkan;
6. pelaksanaan Pembinaan di bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
7. pelaksanaan Pemberdayaan terhadap Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;

8. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
9. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
10. menetapkan SKP Pejabat yang dibawahinya;
11. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas
12. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
13. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. KEPALA BIDANG PASAR RAKYAT

a. Tugas

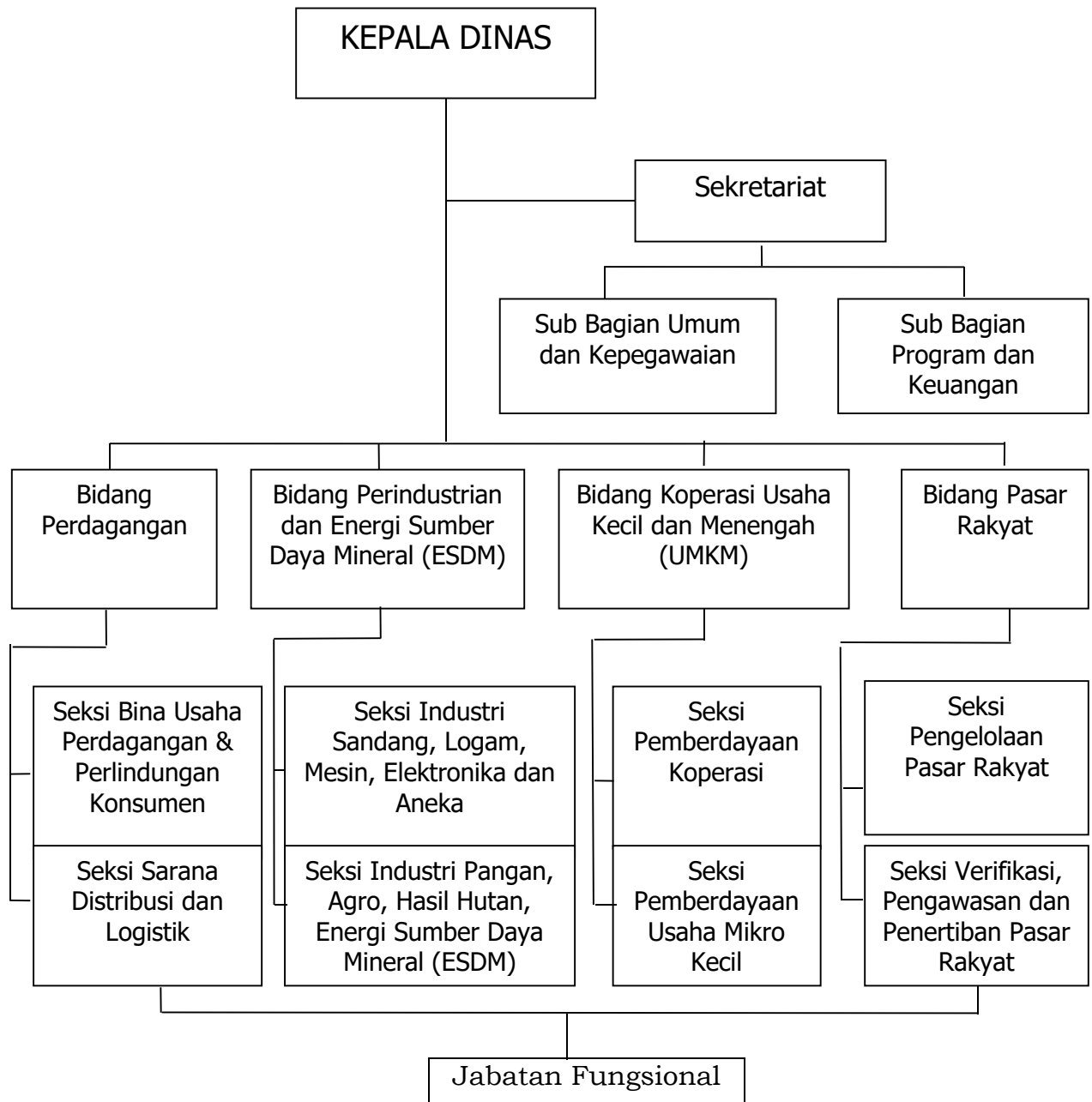
melaksanakan pengelolaan, verifikasi, pengawasan dan penertiban pasar rakyat

b. Fungsi

1. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya di Bidang Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
2. membantu Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam melaksanakan tugasnya di bidang Pasar Rakyat;
3. pengumpulan bahan perumusan kebijakan Teknis di Bidang Pasar Rakyat;
4. penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pasar Rakyat;
5. penyusunan pedoman penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
6. penyusunan rekomendasi penerbitan izin usaha pengelolaan pasar rakyat;
7. perancangan persyaratan dan kewajiban pemakai tempat usaha pasar rakyat;
8. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk tata kelola pasar yang proporsional dan manajerial;

9. penyediaan data dan informasi harga kebutuhan pokok dan barang penting yang dijual di pasar rakyat;
10. penyelenggaraan pengawasan dan pemungutan retribusi jasa pelayanan pasar rakyat;
11. pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian atas semua jenis tanda bukti pembayaran retribusi pasar rakyat;
12. penyusunan rancangan standard, pedoman petunjuk pelaksanaan dan tata kerja pada seksi penertiban;
13. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahannya
14. menetapkan SKP pejabat yang di bawahinya;
15. melaksanakan seluruh kewenangan yang ada sesuai dengan bidang tugasnya;
16. melaporkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
17. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian.

Struktur Organisasi
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Toba



Sumber Data : Lampiran XVIII Peraturan Bupati Toba No. 4 Tahun 2022 tanggal 4 Februari 2022

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya OPD memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS/CPNS) di Lingkungan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba (Keadaan Desember 2024) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Negeri Sipil
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian

Uraian			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
A.	Golongan				
	I	Ib	1	-	1
		Id	-	-	-
	II	IIa	-	-	-
		IIb	2	-	2
		IIc	2	2	4
		IId	1	-	1
	III	IIIa	2	-	2
		IIIb	3	1	4
		IIIc	3	5	8
		IIId	4	2	6
	IV	Iva	1	2	3
		IVb	-	-	-
		IVc	1	-	1
Jumlah			20	12	32
B.	Tingkat Pendidikan		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
	1.	SD	1	-	1
	2.	SLTP	1	-	1
	3.	Paket C	2	-	2
	3.	SLTA	3	1	4
	4.	Diploma (DI, DII, dan DIII)	-	2	2
	5.	DIV/S1	11	9	22
	6.	S2	2	-	2
	7.	S3	-	-	-
Jumlah			20	12	32

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian

Sumber Daya Asset atau Modal Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba memiliki aset berupa sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Berbagai sarana dan prasarana yang ada dirasakan sudah cukup memadai. Sarana dan prasarana yang masih kurang akan dilakukan perbaikan ataupun pengadaan sesuai dengan keadaannya.

Jenis asset yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat terdiri dari:

1. Tanah	Rp.	72.475.844.000,00
2. Peralatan dan Mesin	Rp.	3.416.283.542,00
3. Gedung dan Bangunan	Rp.	61.418.500.876,00
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp.	388.756.400,00
5. Akumulasi Penyusutan	Rp.	(13.075.734.299,00)

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Jenis pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Perumusan Kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Penyelenggaraan bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Pembinaan satuan bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

5. Pengelolaan Data Informasi di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
6. Penyusunan Bahan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
7. Pengelolaan Sarana dan Prasarana dibidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
8. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang Perdagangan, Perindustrian, Pasar Rakyat dan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
Kabupaten Toba Tahun 2021-2024**

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aspek Pelayanan Umum									
1	Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	12,56	12,56	12,56	17,28	12,61	11,00	12,11	23,68
2	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	6,73	8,97	8,97	74,28	436	12,56	8,97	44,74
3	Persentase Koperasi yang berkualitas	4,48	5,61	5,61	6,73	4,41	4,41	5,61	15,97
4	Persentase usaha mikro dan kecil	381	1,80	1,80	1,80	381	2,62	1,80	3,11
5	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	5,10	5,87	6,12	6,38	5,00	47,85	6,12	8,60
6	Persen pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan	31,44	31,99	32,68	33,38	1590	44,28	6,12	8,60
7	Persen peningkatan sarana dan prasarana pasar rakyat	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	20,00
8	Persen stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	98,41	98,41	83,33	96,77	12,50	80,00	94,58	59,76
9	Persen alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda terasah yang berlaku	1,49	8,74	38,49	29,15	12,50	37,58	38,48	51,62
10	Jumlah Jenis Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat regional dan tingkat Nasional	6	6	6	7	6	6	7	7
11	Pertumbuhan Industri	6,61	6,71	6,85	9,95	373	12,25	8,89	6,93
12	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan instansi terkait	96,62	97	98	99,5	96,62	97	98	99
13	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Nilai Evaluasi SAKIP								

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba telah merealisasikan Indikator Kinerja Utama dituangkan dalam tabel berikut:

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	0	10,92	11,03	11,14%	0	11,34	11,24	11,55%
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	0	18,67	19,05	19,43%	0	13,86	14,00	19,48%

Sumber Data : Kabupaten Toba dalam Angka, BPS

1. Target kinerja Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB dapat dihitung dengan:

$$\text{Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Sektor industri adalah segmen ekonomi yang terdiri dari bisnis yang membantu bisnis lain dalam pembuatan, pengiriman atau produksi produk para pelaku usaha. Sektor industrial adalah apa yang dikenal sebagai sektor sekunder, karena produk dan jasa yang ditawarkan sektor ini digunakan atau diproses pada bisnis lain, perhitungan Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha yang dihitung oleh BPS Kabupaten Toba.

2. Sedangkan target kinerja Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB, perhitungan Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB dihitung Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menurut lapangan usaha

yang dihitung oleh BPS Kabupaten Toba. Sektor perdagangan merupakan salah satu bagian dari sistem mata rantai perekonomian suatu wilayah yang pengaruhnya sangat kuat terhadap perkembangan dan pertumbuhan wilayah baik secara internal dan eksternal.

Adapun perhitungan rincian sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB} = \frac{\text{Jumlah Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$$

Capaian Indikator Kinerja Sasaran dan Capaian Indikator Kinerja Program

Berdasarkan capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba untuk tiap-tiap sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya Pembinaan Koperasi/ UMKM dalam Menurunkan Angka Kemiskinan Melalui Pelatihan dan Fasilitasi

Tabel 2.3 Realisasi Kinerja Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi
Periode 2021 sd 2024

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi	5,5	16,81	13	6,67	4,50	39,07	24,60	45,52
1.1	Persentase pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten	12,56	12,56	12,56	12,56	8,35	11,42	23,68	23,68
1.2	Persentase Koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kabupaten	6,73	8,97	8,97	11,21	3,65	37,14	50,00	44,74

1. Persentase Koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi, perhitungan kinerjanya sebagai berikut :

Persentase koperasi/UMKM yang dibina dan difasilitasi

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\% + \frac{\text{Jumlah UMKM yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah UMKM seluruhnya}} \times 100\%$$

1.1 Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten dengan perhitungan sebagai berikut :

Persentase Pemeriksaan dan Pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang diperiksa dan diawasi}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$$

1.2 Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten, dengan perhitungan sebagai berikut:

Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten

$$= \frac{\text{Jumlah Koperasi yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah koperasi seluruhnya}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kesempatan Kerja

Tabel 2.4 Realisasi Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka”

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	2,28	2,28	2,17	2,06	1,62	2,28	1,49	1,09
2.1	Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi Wirausaha	5,87	5,87	6,12	6,38	47,86	5,87	15,43	8,60

2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dihitung sebagai berikut :

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

$$= \frac{\text{Jumlah Penganggur Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100\%$$

Realisasi tersebut di atas bersumber dari data *Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba*, kegiatan yang dilaksanakan untuk tercapainya indikator tersebut yaitu dengan meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM dan IKM, membuka lapangan kerja, meningkatkan peredaran modal usaha, menempatkan pencari kerja di tempat yang tepat, melatih para pencari kerja untuk membuat usaha sendirian memberikan penyuluhan ke masyarakat sehingga Tingkat Pengangguran Terbuka semakin berkurang.

2.1 Indikator Kinerja Meningkatnya Usaha Kecil Yang Menjadi Wirausaha dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Meningkatnya Usaha Kecil yang Menjadi Wirausaha} = \frac{\text{Jumlah Usaha Kecil yang Menjadi Usaha}}{\text{Jumlah Usaha Kecil Keseluruhan}} \times 100\%$$

Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana dan Pengamanan Perdagangan

Tabel 2.5 Realisasi Kinerja “Tingkat Pengangguran Terbuka”

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal	16,67	16,67	20,83	20,83	0	0	0	0
3.1	Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/ SIUP Toko Swalayan)	31,43	31,99	32,68	33,38	8,69	47,27	14,89	49,67
3.2	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	98,41	98,41	96,78	96,77	82,10	91,03	94,58	59,76
3.3	Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	1,49	8,74	17,49	29,15	2,44	13,85	38,49	12,07
3.4	Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan di tingkat Regional dan Tingkat Nasional	6	6	6	7	6	6	7	7

Sumber Data : Bidang Perdagangan

3. Indikator Kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal” target kinerja 20,83% dengan realisasi kinerja 0 % tidak dapat terealisasi, disebabkan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba tidak ada alokasi dana untuk pembinaan kelompok pedagang/usaha informal yang ada.

3.1 “Persentase Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)” dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pelaku Usaha} \\ \text{yang memperoleh izin} \\ \text{sesuai dengan ketentuan} \\ \text{(IUPP/SIUP Pusat} \\ \text{perbelanjaan dan IUTM/} \\ \text{IUTS/SIUP Toko} \\ \text{Swalayan)} \end{array} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Pelaku Usaha di wilayah kabupaten}} \times 100\%$$

Pemohon (pelaku usaha) sudah dapat mengurus izin usahanya secara mandiri melalui Aplikasi OSS (*Online Single System*) yang terhubung langsung ke Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba sebagai dinas terkait yang mengeluarkan izin dan tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap izin usahanya sudah mulai tinggi.

3.2 “*Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok*” dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut:

$$\frac{\text{Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan}}{\text{Variasi Harga Barang Kebutuhan Pokok antar waktu}} = \frac{\text{Rata - rata Harga Kebutuhan Pokok}}{\text{Rata - rata Harga Kebutuhan Pokok}} \times 100\%$$

3.3 Indikator Kinerja “*Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku*” dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut :

$$\frac{\text{Persentase Alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan-nya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku}}{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}} = \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah Potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang diwilayah kabupaten}} \times$$

Pelaksanaan tera dan tera ulang pada pelaku usaha yang memiliki alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) agar tercipta tertib ukur dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha.

3.4 Indikator Kinerja “*Jumlah Produk Lokal yang dapat dipromosikan ditingkat Regional dan Tingkat Nasional*” meliputi promosi produk unggulan daerah yang diikuti Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba, yaitu mengikuti pameran.

**Sasaran Strategis IV: Meningkatnya Pembinaan IKM dalam
Menurunkan Angka Kemiskinan melalui
Pelatihan dan Fasilitasi**

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja “Meningkatnya Pembinaan IKM dalam
Menurunkan Angka Kemiskinan melalui Pelatihan dan Fasilitasi”

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
IV	Persentase IKM yang Dibina dan Difasilitasi		2,87		2,62		59,31		13,48
IV.1	Pertumbuhan Industri	4,0	6,71		7,06	9,45	6,76		9,95

Sumber Data : Bidang Perindustrian dan ESDM

IV.Indikator Kinerja “Persentase IKM yang dibina dan difasilitasi” dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Persentase IKM yang} & & & = \frac{\text{Jumlah IKM yang dibina dan difasilitasi}}{\text{Jumlah IKM seluruhnya}} \times 100\% \\
 \text{dibina dan difasilitasi} & & & \\
 & & & = (216/1602 \times 100) = 13,48\%
 \end{aligned}$$

IV.1“Pertumbuhan Industri” dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Pertumbuhan} & & & = \frac{\text{Jumlah industri tahun } n - \text{Jumlah industri tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah industri sd tahun } n} \times 100\% \\
 \text{Industri} & & &
 \end{aligned}$$

Pertumbuhan industri kecil terus bertambah dan terus berlangsung sehingga masyarakat berusaha untuk dapat mempertahankan kehidupan melalui usaha-usaha baru.

Sasaran Strategis V: Meningkatnya Pertumbuhan Industri

Tabel 2.7 Realisasi Kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin”

No	Indikator Kinerja	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-			
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
V	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	46,67	54,55	57,14	59,46	20,20	100	80,50	25,00
V.1	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	27,27	50,00	56,00	66,67	75,00	70,43	83,19	83,33
V.2	Tersedianya Informasi Industri secara Lengkap dan Terkini	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber Data : Bidang Perindustrian dan ESDM

V. Indikator kinerja “Cakupan Bina Kelompok Pengrajin” dapat dihitung dengan rincian sebagai berikut :

$$\text{Cakupan Bina Kelompok Pengrajin} = \frac{\text{Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan pemda tahun } n}{\text{Jumlah kelompok pengrajin}} \times 100\%$$

$$\text{Persentase Jumlah Hasil Pemantauan \& Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait} = \frac{\text{Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan}}{\text{Jumlah izin yang dikeluarkan}} \times 100\%$$

Kinerja “Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait” ditentukan oleh semakin meningkatnya kesadaran masyarakat sebagai Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk membayar pajak. Instansi terkait yang

mengeluarkan Izin Usaha Industri (IUI) tersebut adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Toba.

V.2 Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini lewat aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) adalah tatanan prosedur dan melaksanakan kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, Perangkat keras dan lunak serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengolahan, serta penyebarluasan data/atau informasi data, yang mana aplikasi yang punya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, dan dilaporkan per semester sehingga ada 2 dokumen laporan tahunan.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah :

- **Koperasi:**
 - a. Berbagai jenis koperasi, baik skala kecil maupun besar.
 - b. Koperasi yang membutuhkan pembinaan dan pengembangan dalam hal organisasi, manajemen, dan usahanya, khususnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih KDMP/KKMP sebagai penguatan ekonomi desa.
- **Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM):**
 - a. Pelaku UMKM yang memerlukan fasilitasi dan pendampingan untuk berkembang.
 - b. UMKM yang membutuhkan akses ke berbagai program pemerintah.

- c. Usaha yang ingin meningkatkan daya saing, mengembangkan kewirausahaan, dan mendapatkan kemudahan berusaha.
 - d. Usaha yang membutuhkan akses ke pembiayaan dan investasi.
- **Perdagangan dan Perindustrian:**
 - a. Pelaku industri dan pedagang yang membutuhkan pembinaan dan pengembangan.
 - b. Usaha-usaha yang bertujuan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
 - c. Industri yang membutuhkan pengembangan kapasitas usaha.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan Pelayanan Urusan Wajib Bidang Koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih

KMP adalah program yang diinisiasi untuk memberdayakan koperasi sebagai soko guru perekonomian, dengan fokus pada penguatan modal, digitalisasi, dan penciptaan rantai pasok yang kuat.

Program Koperasi Merah Putih (KMP) memiliki potensi besar untuk menggerakkan perekonomian daerah. Namun, implementasinya di tingkat akar rumput akan menghadapi sejumlah tantangan dan permasalahan krusial yang spesifik konteks lokal.

Berikut adalah analisis terhadap permasalahan yang mungkin timbul:

1. Permasalahan Koordinasi dan Birokrasi

- **Juknis yang Tidak Jelas dan Terlambat:** Instruksi dan petunjuk teknis (juknis) dari pusat seringkali terlambat sampai ke daerah atau tidak jelas. Hal ini membuat Pemerintah Daerah (Pemda) dan pengurus

koperasi kebingungan dalam melaksanakan program, menyebabkan penundaan dan inefisiensi.

- **Ego Sektoral di Pemda:** Program KMP bisa "terjepit" antar dinas. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, dan Bappelitbangda mungkin tidak sinkron, bahkan saling tunggu, karena tidak ada koordinator yang jelas di tingkat gubernur/bupati.
- **Politik Lokal:** Jika kepala daerah bukan dari koalisi pemerintah pusat, dapat terjadi "**resistensi halus**". Program KMP mungkin tidak diprioritaskan, dialokasikan dana yang minim, atau sengaja diperlambat implementasinya untuk menunjukkan ketidak-sinkronan.

2. Permasalahan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- **Kapasitas Pengurus dan Manajemen:** Banyak pengurus koperasi di daerah memiliki latar belakang tradisional dengan **literasi keuangan, digital, dan manajerial yang terbatas**. Meminta mereka mengelola injeksi modal dan teknologi baru berisiko tinggi terhadap salah kelola dan kegagalan.
- **Keterbatasan Aparat Pendamping:** Jumlah dan kompetensi Penyuluh Koperasi di dinas daerah sangat terbatas. Mereka seringkali kewalahan dan kurang terlatih untuk mendampingi program sekompleks KMP yang menuntut pendekatan modern.
- **Minimnya Tenaga Professional:** Sangat sulit menarik tenaga profesional muda (seperti sarjana ekonomi, manajemen) untuk mau mengelola koperasi di daerah karena gaji dan insentif yang tidak kompetitif.

3. Permasalahan Infrastruktur dan Digitalisasi

- **Kesenjangan Digital:** Di banyak daerah tertinggal dan terpencil, **jaringan internet tidak stabil atau bahkan tidak ada**. Hal ini membuat aspek digitalisasi KMP, seperti platform e-commerce dan

sistem manajemen online, menjadi tidak berguna dan tidak dapat diimplementasikan.

- **Infrastruktur Logistik yang Buruk:** Jalan rusak, biaya distribusi tinggi, dan jarak yang jauh dari pusat ekonomi menjadi penghalang fisik terbesar bagi koperasi untuk menyalurkan produknya.

4. Permasalahan Ekonomi dan Pasar

- **Beban Utang Lama:** Banyak koperasi di daerah telah dibebani dengan utang dari program sebelumnya. Modal baru dari KMP berisiko dialihkan untuk **menutup lubang kas (gali lubang tutup lubang)** alih-alih untuk pengembangan usaha baru.
- **Akses Pasar yang Terbatas:** Tantangan terbesar bukan hanya memproduksi, tetapi menjual. Jika tidak ada jaminan **off-taker** (penyerap produk) yang jelas dari program pemerintah (seperti program food estate atau free lunch), produk koperasi akan menumpuk dan berujung pada kerugian.
- **Persaingan dengan Pelaku Usaha Existing:** Kehadiran KMP yang didukung negara bisa dianggap sebagai ancaman oleh pengusaha menengah dan besar setempat, yang mungkin melakukan tekanan politik atau praktik persaingan tidak sehat.

5. Permasalahan Sosial Budaya dan Tata Kelola

- **Mindset "Bantuan" bukan "Investasi":** Anggota koperasi sering kali terbiasa menganggap bantuan pemerintah sebagai **hibah yang tidak perlu dikembalikan**. Ini sangat berbahaya jika modal KMP berbentuk pinjaman, karena berpotensi menimbulkan kredit macet.

- **KKN dan Nepotisme:** Dalam struktur masyarakat yang erat, pengurus koperasi dapat dikuasai oleh elite lokal atau kerabat pejabat. Bantuan modal KMP berisiko **salah sasaran** dan hanya dinikmati oleh kelompok dalam (inner circle) tertentu.
- **Konflik Internal:** Perebutan pengaruh dan konflik internal antar pengurus atau antar anggota merupakan penyakit kronis yang dapat melumpuhkan koperasi dari dalam.

6. Permasalahan Monitoring dan Evaluasi (Monev)

- **Sistem Pelaporan yang Lemah:** Pemda seringkali tidak memiliki sistem Monev yang efektif dan real-time untuk memantau perkembangan dan penggunaan dana di ratusan koperasi. Laporan seringkali bersifat administratif dan tidak mencerminkan kondisi di lapangan.
- **Tumpang Tindih Program:** Potensi tumpang tindih dengan program bantuan koperasi dari kementerian/lembaga lain sangat tinggi, yang dapat dimanfaatkan oleh oknum untuk mengakses bantuan ganda (**double dipping**).

Keberhasilan Koperasi Merah Putih sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan implementasi di daerah.

Beberapa langkah krusial yang diperlukan:

1. **Koordinasi Kuat di Daerah:** Membentuk **Satgas KMP Daerah** yang dipimpin langsung oleh kepala daerah dan melibatkan swasta serta akademisi.
2. **Pendampingan yang Masif dan Profesional:** Merekrut dan melatih tenaga pendamping profesional (seperti konsultan, praktisi bisnis, mahasiswa magang) untuk turun langsung mendampingi koperasi sasaran.

3. **Penyederhanaan Regulasi dan Digitalisasi:** Membuat platform digital yang sederhana dan dapat diakses dengan jaringan rendah, serta memastikan juknis yang jelas dan tepat waktu.
4. **Pemetaan dan Pendekatan Khusus:** Memetakan koperasi berdasarkan kapasitas dan potensi daerahnya. Tidak semua koperasi bisa disamaratakan penanganannya.
5. **Edukasi dan Sosialisasi Berkelanjutan:** Mengubah pola pikir melalui pelatihan yang berkelanjutan, tidak hanya sekali, untuk membangun budaya koperasi yang modern, mandiri, dan akuntabel.

Tanpa strategi yang matang dan komitmen politik yang kuat dari semua tingkat pemerintahan, Koperasi Merah Putih berisiko menjadi program yang hanya **jaya di concept paper, tetapi gagal di lapangan**.

Permasalahan Pelayanan Urusan Wajib Bidang UMKM

Program Astacita berfokus pada pembangunan ekonomi melalui industrialisasi dan program strategis seperti *free lunch*/MBG akan membawa dampak besar bagi UMKM di daerah.

Berikut adalah analisis permasalahan pelayanan UMKM di daerah:

1. Permasalahan Akses Permodalan dan Keuangan

- **Skema Kredit yang Tidak Sesuai:** Skema kredit dari perbankan nasional seringkali terlalu kaku dan mensyaratkan agunan (collateral) yang tidak dimiliki oleh sebagian besar UMKM mikro di daerah. Mereka butuh skema **modal kerja** yang mudah dan cepat, bukan kredit investasi berjangka panjang.
- **Dominasi Rentenir:** Akibat sulitnya akses ke perbankan, banyak pelaku UMKM masih bergantung pada pinjaman rentenir dengan bunga tinggi yang membelit usaha mereka.

- **Kesiapan Financial Literacy:** Banyak pelaku UMKM tidak memiliki pembukuan yang rapih, sehingga kesulitan mengajukan proposal kredit yang *bankable* dan mengelola pinjaman yang diterima.

2. Permasalahan Pemasaran dan Akses Pasar

- **Ketergantungan pada Pasar Lokal:** Pasar tradisional yang jenuh dan daya beli yang terbatas di daerah menjadi penghambat utama pertumbuhan UMKM.
- **Digitalisasi yang Setengah Hati:** Walaupun banyak UMKM sudah *go online*, kebanyakan hanya aktif di media sosial (seperti Instagram dan WhatsApp) tanpa strategi pemasaran digital yang matang. Mereka kesulitan mengoptimalkan platform e-commerce karena masalah **logistik, promosi, dan manajemen toko online**.
- **Kompetisi dengan Produk Impor dan Marketplace Raksasa:** UMKM kesulitan bersaing dengan harga produk impor yang murah dan dominasi algoritma platform *e-commerce* yang lebih mempromosikan seller besar.

3. Permasalahan Infrastruktur dan Teknologi

- **Konektivitas Internet yang Tidak Merata:** Di banyak daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), sinyal internet masih lemah dan tidak stabil. Hal ini menghambat program digitalisasi UMKM.
- **Logistik dan Distribusi yang Mahal:** Biaya pengiriman yang tinggi dari daerah ke kota-kota besar membuat harga produk UMKM tidak kompetitif. Infrastruktur jalan yang buruk juga memperparah kondisi ini.
- **Keterbatasan Energi:** Masih ada wilayah yang sering mengalami pemadaman listrik, yang mengganggu kelancaran proses produksi UMKM.

4. Permasalahan Regulasi dan Birokrasi

- **Perizinan yang Berbelit:** Proses perizinan usaha (seperti NIB) di tingkat daerah masih sering kali rumit, tidak transparan, dan memakan waktu lama. "**Pungli**" (Pungutan Liar) masih menjadi momok di beberapa tempat.
- **Ketidakharmonisan Kebijakan:** Kebijakan dari pemerintah pusat (contoh: dari KemenkopUKM, Kemendag, Kemenperin) sering kali tumpang tindih dan tidak sampai dengan sosialisasi yang jelas ke daerah, menyebabkan kebingungan di kalangan pelaku UMKM dan aparat pemda.
- **Ego Sektoral:** Sering terjadi ego sektoral antar dinas di pemda (contoh: Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM) yang menyebabkan pelayanan kepada UMKM tidak terintegrasi dan tidak efektif.

5. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Manajemen

- **Mindset Tradisional:** Banyak pelaku UMKM yang sudah nyaman dengan cara kerja konvensional dan resisten terhadap perubahan dan inovasi.
- **Keterbatasan Skill:** Minimnya keterampilan dalam manajemen keuangan, pemasaran digital, desain produk, dan standardisasi menjadi penghalang besar untuk naik kelas.
- **Kurangnya Tenaga Pendamping Profesional:** Aparat dinas terkait di daerah (seperti penyuluh) jumlahnya terbatas dan kapasitasnya sering kali tidak mencukupi untuk memberikan pendampingan yang komprehensif dan modern.

6. Permasalahan Bahan Baku dan Inovasi Produk

- **Ketergantungan Bahan Baku Impor:** Sebagian UMKM manufaktur masih bergantung pada bahan baku impor yang fluktuatif harganya dan rentan terhadap gejolak global.
- **Stagnansi Produk:** Kesulitan dalam berinovasi dan mengembangkan desain produk baru menyebabkan produk UMKM tertinggal dan kalah bersaing dari segi model dan fungsi.

Kebijakan Astacita seperti program *free lunch*/MBG dan pembangunan infrastruktur masif justru bisa menjadi **pendorong utama (driver)** bagi UMKM jika diimplementasikan dengan benar.

Rekomendasi Solusi:

1. **Integrasi dengan Program Pemerintah:** Menjadikan UMKM lokal sebagai **supply chain utama** program *free lunch*/MBG dan proyek infrastruktur. Ini akan membuka pasar terjamin (off-taker) yang sangat dibutuhkan.
2. **Penyederhanaan Regulasi dan Digitalisasi Perizinan:** Memperkuat penggunaan sistem **OSS RBA (Online Single Submission - Risk Based Approach)** hingga ke daerah terpencil, dengan pendampingan dari aparat setempat.
3. **Pendampingan yang Masif dan Terukur:** Membangun program pendampingan yang melibatkan **akademisi (kampus), praktisi bisnis, dan CSR perusahaan** untuk transfer ilmu dan teknologi kepada UMKM.
4. **Subsidi Logistik dan Digital:** Memberikan subsidi khusus untuk biaya pengiriman dan iklan digital bagi UMKM yang berjualan online untuk meningkatkan daya saing.

5. **Penguatan Kelembagaan:** Memperkuat peran **Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dan Koperasi** di daerah sebagai garda terdepan yang memberikan pelayanan terpadu dan informasi yang jelas bagi UMKM.

Pemerintah Kabupaten Toba memiliki peluang besar untuk mentransformasi UMKM daerah. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan memperbaiki tata kelola pelayanan di tingkat daerah, memutuskan mata rantai birokrasi yang ruwet, dan memastikan program-program strategis nasional benar-benar sesuai dengan kebutuhan riil pelaku UMKM di lapangan. Tanpa itu, jurang antara kebijakan pusat dan implementasi daerah akan tetap lebar.

Berikut adalah enam tantangan utama yang dihadapi UMKM di tahun 2025:

1. Penurunan Daya Beli: Terutama dari masyarakat kelas menengah yang menjadi penyumbang 60% konsumsi domestik.
2. Melemahnya Ekspor: Dampak dari penurunan daya beli dunia, konflik perdagangan, dan ketegangan geopolitik.
3. Meningkatnya Non-Performing Loan (NPL): Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam pertumbuhan kredit bagi UMKM.
4. Perubahan Iklim: Berpengaruh pada UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan.
5. Perubahan Kebijakan Pemerintah: Perubahan regulasi yang dapat mempengaruhi biaya operasional UMKM.
6. Lemahnya Kompetensi Digitalisasi: Banyak UMKM yang belum optimal memanfaatkan teknologi digital untuk pemasaran dan penjualan.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Pemerintah Pusat dihadapkan pada sejumlah tantangan kompleks dalam pelayanan bidang perdagangan di daerah. Kebijakan sentralistik seperti program *free lunch/Makanan Bergizi Gratis MBG* dan fokus pada ketahanan

pangan harus diimplementasikan dalam *landscape* perdagangan daerah yang heterogen dan penuh dengan tantangan struktural.

Berikut adalah analisis permasalahan utama yang dihadapi:

1. Permasalahan Infrastruktur Logistik dan Distribusi

- **Biaya Logistik yang Tinggi:** Infrastruktur transportasi yang belum merata (jalan rusak, pelabuhan terbatas) menyebabkan **tingginya biaya distribusi** barang dari dan ke daerah. Hal ini membuat harga produk menjadi tidak kompetitif dan mengurangi daya saing produk lokal.
- **Rantai Dingin (Cold Chain) yang Terbatas:** Kurangnya infrastruktur pendingin yang memadai untuk komoditas segar (ikan, daging, sayuran) mengakibatkan **tingginya susut (losses)** dan penurunan kualitas produk, menghambat distribusi yang efisien untuk program seperti *free lunch*.
- **Keterbatasan Gudang dan Pusat Logistik:** Daerah sering kekurangan gudang modern dan pusat logistik yang terintegrasi, menyebabkan penumpukan barang, inefisiensi, dan kesulitan dalam mengelola stok untuk stabilisasi harga.

2. Permasalahan Regulasi dan Birokrasi

- **Perda yang Menghambat Perdagangan Antar Daerah:** Masih adanya **Peraturan Daerah (Perda)** yang bersifat **proteksionis** dan membatasi masuknya produk tertentu dari daerah lain, menciptakan *barrier to trade* dan distorsi pasar.
- **Pungutan Liar (Pungli) dan Retribusi yang Tidak Jelas:** Praktik pungli di pelabuhan, pos pemeriksaan, dan pasar tradisional masih marak. Retribusi daerah yang bertumpuk dan tidak transparan membebani pedagang dan meningkatkan harga akhir.

- **Tumpang Tindih Regulasi:** Kerumitan dan ketidakharmonisan antara regulasi pusat dan daerah menyulitkan pelaku usaha, terutama UMKM, untuk beradaptasi dan mematuhi peraturan.

3. Permasalahan Pasar dan Struktur Perdagangan

- **Dominasi Tengkulak dan Supply Chain yang Panjang:** Struktur perdagangan hasil bumi (seperti beras, cabai, bawang) masih dikuasai oleh tengkulak dan mata rantai distribusi yang panjang. Hal ini menyebabkan **margin yang besar tidak sampai ke petani/nelayan**, tetapi justru dinikmati oleh para pedagang perantara.
- **Ketergantungan pada Pasar Tradisional yang Tidak Terkelola:** Pasar tradisional sebagai ujung tombak perdagangan daerah seringkali dalam kondisi kumuh, tidak higienis, dan manajemennya lemah, sehingga kalah bersaing dengan pasar modern (minimarket/supermarket).
- **Kesenjangan Informasi Harga:** Petani dan produsen di daerah sering tidak memiliki akses informasi harga yang transparan dan real-time di tingkat grosir/konsumen, sehingga posisi tawar mereka lemah.

4. Permasalahan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Aparatur

- **Kapasitas Aparat Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang Terbatas:** Seringkali jumlah SDM yang kurang, kompetensi yang terbatas dalam analisis pasar dan logistik modern, serta minimnya alat pendukung (seperti sistem IT) untuk pengawasan dan pelayanan.
- **Mindset Aparat yang Masih "Pengawas" bukan "Fasilitator":** Pola pikir birokrasi lama yang lebih suka melakukan pengawasan dan penindakan daripada memfasilitasi dan mempermudah arus perdagangan untuk kepentingan masyarakat.

5. Permasalahan Ketersediaan dan Stabilisasi Harga Komoditas Pokok

- **Kerawanan Pangan di Daerah Tertentu:** Daerah-daerah terpencil sangat rentan terhadap gejolak harga dan kelangkaan barang akibat masalah distribusi dan logistik.
- **Ketidakefektifan Operasi Pasar:** Intervensi pemerintah melalui operasi pasar seringkali terlambat, skalanya terlalu kecil, dan tidak tepat sasaran, sehingga gagal menstabilkan harga secara signifikan.
- **Spekulasi dan Penimbunan:** Masih maraknya praktik spekulasi dan penimbunan yang dilakukan oleh oknum besar yang memanfaatkan ketatnya *supply chain*, sulit dibendung oleh aparat di daerah.

6. Permasalahan Digitalisasi Perdagangan

- **Kesenjangan Digital:** Tidak semua daerah dan pelaku usaha memiliki akses dan kemampuan yang sama untuk bertransformasi digital. Pedagang kecil di pasar tradisional kesulitan beradaptasi dengan sistem *e-commerce*.
- **Persaingan dengan Platform Raksasa:** UMKM dan pedagang lokal kewalahan bersaing dengan platform *e-commerce* nasional/besar yang memiliki daya kapital dan algoritma promosi yang kuat.

Kebijakan/Program Astacita dapat menjadi katalis jika diiringi dengan pendekatan yang tepat di daerah:

1. **Revitalisasi Infrastruktur Logistik Daerah:** Memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jalan, pelabuhan perintis, serta **cold storage** dan **logistik center** di sentra-sentra produksi.
2. **Harmonisasi Regulasi dan Perizinan:** Pemerintah pusat perlu mendorong revisi Perda yang menghambat perdagangan dan

memastikan implementasi **OSS (Online Single Submission)** benar-benar lancar di daerah.

3. **Memperpendek Rantai Pasok (Supply Chain):** Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan **koperasi pemasaran** atau **BUMDes** yang kuat untuk langsung menyalurkan produk dari petani/nelayan ke pasar modern atau program pemerintah (*free lunch*/MBG).
4. **Penguatan Sistem Informasi Pasar:** Mengembangkan platform digital yang terintegrasi untuk memantau stok dan harga komoditas pokok secara real-time di seluruh daerah.
5. **Peningkatan Kapasitas Aparatur:** Pelatihan berkelanjutan untuk aparat dinas perdagangan daerah dengan fokus pada logistik modern, analisis pasar, dan pendekatan fasilitatif.
6. **Integrasi dengan Program Nasional:** Menjadikan daerah sebagai **mitra utama penyedia** untuk program *free lunch* dan ketahanan pangan, yang akan mendorong investasi dan penciptaan pasar yang pasti bagi produk lokal.

Permasalahan perdagangan di daerah bersifat **multidimensional**, mencakup infrastruktur, regulasi, struktur pasar, dan SDM. Keberhasilan Pemerintah dalam bidang ini akan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk **mendorong kebijakan yang terintegrasi dari hulu ke hilir, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, dan memastikan bahwa arus perdagangan lancar untuk kepentingan rakyat banyak**, bukan hanya segelintir orang.

Permasalahan Pelayanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Kebijakan/Program Astacita yang berfokus pada industrialisasi dan transformasi ekonomi akan menghadapi sejumlah tantangan mendasar dalam membangun sektor perindustrian di daerah. Kebijakan nasional perlu ditranslasikan dengan tepat di tingkat daerah yang memiliki karakteristik, potensi, dan keterbatasan yang unik.

Berikut adalah analisis permasalahan pelayanan bidang perindustrian di daerah:

1. Permasalahan Infrastruktur dan Konektivitas

- **Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar:** Kawasan industri di daerah kekurangan **akses listrik yang andal dengan kapasitas memadai**, pasokan air bersih untuk industri, serta jaringan jalan yang menghubungkan ke pelabuhan atau bandara. Hal ini menjadi penghambat utama investasi.
- **Biaya Logistik yang Tinggi:** Ketidakefisienan di pelabuhan daerah, biaya transportasi yang mahal, dan infrastruktur jalan yang buruk memperpanjang waktu dan meningkatkan biaya distribusi bahan baku dan hasil produksi, mengurangi daya saing produk industri lokal.
- **Keterbatasan Teknologi Digital:** Jaringan internet yang lambat dan tidak merata (kesenjangan digital) menghambat adopsi **Industri 4.0** seperti IoT, *cloud computing*, dan automasi di kalangan industri menengah dan kecil di daerah.

2. Permasalahan Regulasi dan Iklim Investasi

- **Ketidakpastian dan Kompleksitas Perizinan:** Proses perizinan industri (Izin Usaha Industri/IUI, AMDAL) di tingkat daerah seringkali berbelit, tidak transparan, dan memakan waktu lama. **Ego sektoral** antar dinas (Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Dinas Lingkungan Hidup) memperparah kondisi ini.
- **Insentif yang Tidak Kompetitif:** Daerah seringkali kesulitan menawarkan paket insentif (perpajakan, keringanan retribusi) yang dapat menyaingi daya tarik kawasan industri di pusat atau daerah lain, sehingga kurang menarik bagi investor besar.
- **Tumpang Tindih Regulasi:** Konflik atau ketidakharmonisan antara Perda (Peraturan Daerah) dengan regulasi pusat menciptakan ketidakpastian hukum bagi investor.

3. Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kapasitas Teknologi

- **Kesenjangan Kompetensi:** Kurikulum pendidikan vokasi (SMK, politeknik) di daerah sering tidak selaras dengan kebutuhan dunia industri modern, menyebabkan **miss-match** antara skill lulusan dan kebutuhan industri.
- **Brain Drain:** Tenaga kerja terampil dan terdidik lebih memilih bekerja di kota besar atau pusat industri, sehingga industri di daerah kekurangan **manajer, supervisor, dan tenaga teknis** yang kompeten.
- **Keterbatasan Inovasi dan Riset:** *Linkage* (keterkaitan) yang lemah antara industri di daerah dengan perguruan tinggi dan lembaga riset setempat. Akibatnya, proses alih teknologi, inovasi produk, dan peningkatan produktivitas berjalan lambat.

4. Permasalahan Bahan Baku dan Rantai Pasok

- **Ketergantungan pada Bahan Baku Impor:** Banyak industri manufaktur di daerah, terutama yang bergerak di bidang permesinan dan elektronik, masih sangat bergantung pada bahan baku dan komponen impor yang mahal dan rentan terhadap gejolak global.
- **Rantai Pasok yang Tidak Andal:** Kesulitan mendapatkan bahan baku lokal dengan kualitas yang konsisten dan kuantitas yang memadai menghambat kelancaran produksi.
- **Lemahnya Keterkaitan Industri (*Industrial Linkage*):** Industri besar yang ada di daerah (jika ada) seringkali tidak membangun **cluster** atau merangkul UMKM lokal sebagai vendor pemasok komponen, sehingga *multiplier effect* bagi perekonomian daerah kecil.

5. Permasalahan Pemasaran dan Daya Saing

- **Pasar yang Terbatas:** Daya beli masyarakat di daerah relatif terbatas, sehingga industri harus mengekspor ke daerah lain atau ekspor yang kembali dihadapkan pada masalah biaya logistik tinggi.

- **Persaingan dengan Produk Impor:** Produk industri daerah, terutama UMKM, kesulitan bersaing dengan membanjirnya produk impor yang lebih murah dan memiliki brand yang lebih kuat.
- **Lemahnya Branding dan Desain:** Produk industri daerah seringkali kurang memiliki nilai tambah dari segi desain, kemasan, dan branding sehingga hanya terjual sebagai komoditas dengan margin rendah.

6. Permasalahan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah

- **Kualitas SDM Aparatur Urusan Perindustrian:** Seringkali aparat di dinas perindustrian daerah memiliki kapasitas terbatas dalam menyusun roadmap industri, melakukan pendampingan teknis, dan menarik investasi yang berkualitas.
- **Anggaran yang Terbatas:** Dana APBD untuk program pengembangan industri seringkali sangat terbatas dan tidak fokus, sehingga program yang dijalankan bersifat seremonial dan tidak impactful.

Kebijakan/Program Astacita yang pro-industrialisasi dan pembangunan infrastruktur masif dapat menjadi solusi jika diturunkan dengan strategi yang tepat di daerah:

1. **Pembangunan Infrastruktur Berorientasi Industri:** Memprioritaskan pembangunan **jalan industri, listrik industri**, dan konektivitas logistik di kawasan produksi utama, termasuk pembangunan **digital infrastructure**.
2. **"One-Stop Service" yang Nyata:** Merevitalisasi pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk perizinan investasi dan industri, dengan memangkas birokrasi dan memberikan kepastian waktu.
3. **Pendidikan Vokasi yang Link and Match:** Menciptakan program pelatihan dan magang masif yang didesain bersama antara **pemda, industri, dan SMK/Politeknik** untuk menciptakan tenaga kerja siap pakai.

4. **Pengembangan Klaster Industri Berbasis Potensi Lokal:** Fokus pada pengembangan satu atau dua industri unggulan berbasis komoditas lokal (seperti industri pengolahan hasil perikanan, perkebunan, atau tambang) dan membangun ekosistemnya secara lengkap.
5. **Insentif yang Tepat Sasaran:** Memberikan insentif fiskal dan non-fiskal yang menarik bagi industri yang melakukan alih teknologi, membangun R&D di daerah, dan melibatkan UMKM lokal dalam rantai pasoknya.
6. **Integrasi dengan Program Nasional:** Memastikan industri di daerah menjadi bagian dari **rantai pasok program strategis nasional** seperti *free lunch*/MBG, pembangunan ibu kota negara (IKN), dan program infrastruktur lainnya.

Pembangunan industri di daerah adalah kunci untuk mengurangi kesenjangan dan menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Tantangan terbesarnya adalah **menciptakan ekosistem industri yang terintegrasi**—mulai dari infrastruktur, regulasi, SDM, hingga rantai pasok—yang saat ini masih sangat lemah. Keberhasilan Pemerintah Pusat akan diukur dari kemampuannya mentransformasi kebijakan industrialisasi nasional menjadi aksi nyata yang terasa dampaknya oleh industri dan masyarakat di seluruh daerah di Indonesia.

2.2.2 Isu Strategis

Isu-Isu Strategis Pelayanan Urusan Wajib Bidang Koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih

Penguatan Koperasi Merah Putih (KMP) menjadi salah satu program prioritas. Implementasinya di tingkat desa/kelurahan menghadapi sejumlah isu strategis yang menentukan keberhasilan program ini dalam memberdayakan ekonomi rakyat.

A. Isu Strategis Internal

1. Kapasitas Pengurus dan Manajemen

- **Kompetensi Terbatas:** Pengurus koperasi di tingkat desa seringkali memiliki latar belakang non-manajerial dan keterampilan terbatas dalam pengelolaan keuangan, pemasaran, dan tata kelola organisasi modern.
- **Literasi Digital Rendah:** Kemampuan dalam memanfaatkan teknologi digital untuk administrasi, pemasaran, dan akses keuangan masih sangat terbatas.

2. Permodalan dan Keuangan

- **Keterbatasan Modal Awal:** Koperasi desa seringkali kesulitan mengumpulkan modal awal yang memadai dari simpanan anggota.
- **Akses ke Sumber Pembiayaan:** Kesulitan mengakses pembiayaan dari perbankan karena keterbatasan agunan dan kapasitas pengelolaan keuangan.
- **Manajemen Keuangan yang Belum Profesional:** Pencatatan keuangan yang sederhana dan tidak transparan berisiko menimbulkan masalah di kemudian hari.

3. Jaringan Pemasaran dan Nilai Tambah

- **Ketergantungan pada Pasar Lokal:** Produk yang dihasilkan seringkali hanya dipasarkan di sekitar desa dengan nilai jual rendah.
- **Lemahnya Kemasan dan Branding:** Produk unggulan desa kurang memiliki kemasan yang menarik dan branding yang kuat untuk bersaing di pasar yang lebih luas.
- **Rantai Pasok yang Panjang:** Hasil produksi seringkali harus melalui banyak perantara sebelum sampai ke konsumen akhir, sehingga margin keuntungan untuk petani/produsen kecil.

B. Isu Strategis Eksternal

1. Koordinasi dan Dukungan Pemerintah Daerah

- **Koordinasi antar Dinas:** Sering terjadi tumpang tindih program antara Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan Dinas PMD-PP, dan dinas lainnya.
- **Kapasitas Aparat Pendamping:** Aparat pendamping dari tingkat kecamatan/kabupaten seringkali jumlahnya terbatas dan kapasitasnya tidak memadai.
- **Keterlambatan Penyaluran Bantuan:** Mekanisme penyaluran bantuan yang berbelit menyebabkan bantuan sering terlambat sampai.

2. Regulasi dan Birokrasi

- **Perizinan yang Rumit:** Proses perizinan untuk koperasi di tingkat desa masih dirasakan menyulitkan.
- **Pelaporan yang Berbelit:** Kewajiban pelaporan yang kompleks menyulitkan koperasi dengan SDM terbatas.

3. Infrastruktur dan Teknologi

- **Keterbatasan Infrastruktur Digital:** Jaringan internet yang tidak merata dan keterbatasan perangkat teknologi menghambat digitalisasi koperasi.
- **Infrastruktur Pendukung:** Kurangnya gudang penyimpanan, cold storage, dan sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan nilai tambah produk.

C. Isu Strategis Kebijakan Nasional

1. Integrasi dengan Program Nasional

- **Program Free Lunch/MBG dan Food Estate:** Bagaimana koperasi desa dapat terlibat dalam *supply chain* program strategis nasional ini.
- **Keterkaitan dengan BUMDes:** Sinergi antara KMP dengan BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi desa.

2. Digitalisasi dan Fintech

- **Platform Digital Koperasi:** Pengembangan platform digital terpadu untuk administrasi, pemasaran, dan keuangan koperasi.
- **Akses ke Financial Technology:** Mempermudah akses koperasi terhadap layanan fintech dan perbankan digital.

3. Pemberdayaan Berbasis Klaster

- **Pengembangan Berbasis Potensi Lokal:** Setiap koperasi desa perlu dikembangkan sesuai dengan potensi unggulan daerahnya.
- **Pendekatan Klaster:** Pengembangan koperasi dalam klaster-klaster based pada komoditas unggulan wilayah.

Isu-Isu Strategis Pelayanan Urusan Wajib Bidang UMKM

Pemerintah Pusat membawa agenda transformasi ekonomi yang berfokus pada industrialisasi dan program strategis seperti *free lunch*/MBG. Implementasi kebijakan ini di tingkat daerah akan menghadapi sejumlah isu strategis dalam pelayanan UMKM yang menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi inklusif.

A. Isu Strategis Pasar dan Akses Pemasaran

1. Integrasi dengan Rantai Pasok Nasional

- **Keterlibatan dalam Program Strategis:** Bagaimana UMKM daerah dapat terintegrasi dalam program *free lunch*/MBG dan proyek infrastruktur nasional sebagai pemasok barang dan jasa
- **Standardisasi Kualitas:** Tantangan dalam memenuhi standar kualitas, kuantitas, dan kontinuitas yang diperlukan untuk supply chain pemerintah

2. Digitalisasi Pemasaran

- **Kesenjangan Digital:** Ketimpangan akses internet dan literasi digital antara UMKM perkotaan dan pedesaan
- **Persaingan Platform E-commerce:** Dominasi platform besar yang membuat UMKM kesulitan bersaing secara daring

B. Isu Strategis Akses Permodalan dan Keuangan

1. Inklusi Keuangan Digital

- **Akses Pembiayaan Alternatif:** Perluasan *fintech* dan *crowdfunding* yang sesuai dengan karakteristik UMKM daerah

- **Kredit Usaha Rakyat (KUR):** Efektivitas penyaluran KUR hingga ke pelosok daerah dengan persyaratan yang adaptif

2. Manajemen Keuangan UMKM

- **Literasi Keuangan:** Rendahnya kemampuan pengelolaan keuangan dan pembukuan sederhana
- **Akses Permodalan Non-Bank:** Skema pembiayaan inovatif melalui BUMDes atau koperasi

C. Isu Strategis Kapasitas dan Produktivitas

1. Peningkatan Kapasitas Produksi

- **Teknologi Produksi:** Adopsi teknologi tepat guna untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk
- **Standardisasi Produk:** Kesulitan dalam memenuhi standar mutu dan keamanan produk

2. Pengembangan SDM

- **Pelatihan Vokasi:** Keterkaitan program pelatihan dengan kebutuhan riil UMKM daerah
- **Regenerasi Wirausaha:** Minat generasi muda terhadap usaha skala mikro yang masih rendah

D. Isu Strategis Regulasi dan Birokrasi

1. Kemudahan Berusaha

- **Perizinan Usaha:** Implementasi NIB (Nomor Induk Berusaha) di daerah yang masih menghadapi kendala teknis
- **Harmonisasi Perda:** Potensi konflik antara peraturan daerah dengan kebijakan pusat

2. Insentif dan Perlindungan

- **Perlindungan Pasar:** Kebijakan proteksi untuk UMKM dari persaingan tidak sehat dan produk impor
- **Insentif Fiskal:** Skema insentif perpajakan dan non-pajak yang tepat sasaran

E. Isu Strategis Infrastruktur dan Dukungan

1. Infrastruktur Pendukung

- **Logistik dan Distribusi:** Biaya logistik tinggi dan infrastruktur transportasi yang belum memadai
- **Energi dan Konektivitas:** Ketersediaan listrik dan internet yang belum merata

2. Ekonomi Hijau

- **Transformasi Hijau:** Dukungan untuk UMKM dalam transisi menuju ekonomi berkelanjutan
- **Energi Terbarukan:** Pemanfaatan energi terbarukan untuk menekan biaya produksi

Isu-Isu Strategis Pelayanan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Pemerintah fokus pada pembangunan ekonomi dan program strategis seperti *free lunch*/MBG akan menghadapi sejumlah isu strategis dalam pelayanan urusan perdagangan di daerah.

Berikut analisis mengenai isu-isu tersebut:

A. Isu Strategis Infrastruktur dan Logistik

1. Ketimpangan Infrastruktur Logistik

- **Konektivitas Antar Daerah:** Masih lemahnya konektivitas transportasi antara pusat produksi di daerah dengan pusat distribusi dan konsumsi
- **Kualitas Jalan dan Aksesibilitas:** Infrastruktur jalan yang tidak memadai terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T)
- **Keterbatasan Gudang dan Cold Storage:** Minimnya fasilitas penyimpanan modern yang berdampak pada tingginya *losses* produk segar

2. Biaya Logistik Tinggi

- **Inefisiensi Rantai Pasok:** Rantai distribusi yang panjang dan tidak efisien menyebabkan tingginya biaya logistik
- **Ketergantungan pada Moda Transportasi Tertentu:** Dominasi transportasi jalan raya dengan biaya tinggi dibandingkan moda lain

B. Isu Strategis Pasar dan Distribusi

1. Disparitas Harga dan Ketersediaan Barang

- **Fluktuasi Harga Komoditas Pokok:** Ketidakstabilan harga terutama untuk bahan pangan di berbagai daerah
- **Kelangkaan Barang Tertentu:** Masih sering terjadi kelangkaan barang tertentu di daerah 3T

2. Pasar Tradisional vs Modern

- **Daya saing Pasar Tradisional:** Ketidakmampuan pasar tradisional bersaing dengan pasar modern
- **Revitalisasi Pasar:** Tantangan dalam merevitalisasi pasar tradisional agar lebih higienis dan efisien

C. Isu Strategis Regulasi dan Kebijakan

1. Harmonisasi Regulasi

- **Tumpang Tindih Regulasi:** Konflik antara peraturan pusat dan daerah yang menghambat perdagangan antar daerah
- **Perizinan Berusaha:** Kompleksitas perizinan untuk kegiatan perdagangan di daerah

2. Pungutan Daerah

- **Retribusi dan Pungutan Liar:** Masih maraknya pungutan tidak resmi yang membebani pelaku usaha
- **Perda yang Menghambat Perdagangan:** Adanya perda yang bersifat proteksionis daerah

D. Isu Strategis Digitalisasi Perdagangan

1. Kesenjangan Digital

- **Akses Internet Tidak Merata:** Masih adanya kesenjangan akses internet antara daerah perkotaan dan pedesaan
- **Literasi Digital Pelaku Usaha:** Rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital

2. Platform Perdagangan Elektronik

- **Dominasi Platform Besar:** Kesulitan pelaku usaha lokal bersaing dengan platform e-commerce besar
- **Infrastruktur Digital:** Keterbatasan infrastruktur pendukung perdagangan elektronik

E. Isu Strategis Sumber Daya Manusia

1. Kapasitas Aparatur

- **Kompetensi SDM Dinas Perdagangan:** Keterbatasan kemampuan teknis aparatur dalam pengawasan dan pembinaan
- **Kuantitas Aparatur:** Keterbatasan jumlah petugas yang menangani urusan perdagangan di daerah

2. Kapasitas Pelaku Usaha

- **Kemampuan Manajerial:** Rendahnya kemampuan manajemen usaha pada pelaku usaha kecil
- **Innovasi dan Kreativitas:** Tantangan dalam berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan pasar

Isu-Isu Strategis Pelayanan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Pemerintah Pusat dengan visi industrialisasi dan transformasi ekonomi akan menghadapi sejumlah isu strategis dalam pengembangan sektor perindustrian di daerah.

Berikut analisis komprehensif isu-isu tersebut:

A. Isu Strategis Infrastruktur dan Teknologi

1. Ketersediaan Infrastruktur Dasar

- **Energi dan Kelistrikan:** Keterbatasan pasokan listrik dengan kapasitas memadai untuk kawasan industri
- **Air Bersih Industri:** Ketersediaan air baku untuk kebutuhan proses produksi industri
- **Jalan Industri:** Akses jalan menuju kawasan industri yang memadai

2. Konektivitas Digital

- **Jaringan Internet:** Keterbatasan jaringan broadband untuk mendukung industri 4.0
- **Adopsi Teknologi:** Rendahnya adopsi teknologi digital dalam proses produksi

B. Isu Strategis Sumber Daya Manusia

1. Kompetensi Tenaga Kerja

- **Skills Mismatch:** Ketidaksesuaian kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri
- **Produktivitas Tenaga Kerja:** Rendahnya produktivitas kerja dibanding negara lain

2. Brain Drain

- **Mobilitas SDM Terampil:** Kecenderungan tenaga terampil pindah ke pusat industri besar
- **Regenerasi SDM:** Minimnya minat generasi muda bekerja di sektor industri

C. Isu Strategis Regulasi dan Iklim Investasi

1. Kemudahan Berusaha

- **Perizinan Industri:** Kompleksitas perizinan dan pengurusan AMDAL
- **Insentif Investasi:** Ketidakpastian insentif fiskal dan non-fiskal

2. Harmonisasi Kebijakan

- **Koordinasi Pusat-Daerah:** Tumpang tindih kebijakan pusat dan daerah
- **Peraturan Daerah:** Adanya perda yang menghambat perkembangan industri

D. Isu Strategis Bahan Baku dan Rantai Pasok

1. Ketahanan Bahan Baku

- **Ketergantungan Impor:** Tingginya ketergantungan pada bahan baku impor
- **Ketersediaan Lokal:** Tidak terjaminnya pasokan bahan baku lokal

2. Rantai Pasok

- **Logistik Material:** Inefisiensi dalam rantai pasok bahan baku
- **Distribution Network:** Lemahnya jaringan distribusi produk industri

E. Isu Strategis Pasar dan Daya Saing

1. Akses Pasar

- **Pasar Global:** Kesulitan penetrasi pasar ekspor
- **Pasar Domestik:** Tekanan dari produk impor yang membanjiri pasar lokal

2. Daya Saing

- **Biaya Produksi:** Tingginya biaya produksi dibanding negara kompetitor
- **Kualitas Produk:** Tantangan dalam memenuhi standar kualitas internasional

F. Isu Strategis Inovasi dan Teknologi

1. Riset dan Pengembangan

- **Anggaran R&D:** Rendahnya alokasi anggaran untuk penelitian
- **Kolaborasi Riset:** Lemahnya link and match dengan perguruan tinggi

2. Adopsi Teknologi

- **Industri 4.0:** Lambatnya adopsi teknologi industri 4.0
- **Digital Transformation:** Tantangan transformasi digital UMKM industri

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah :

“Meningkatnya Kualitas Koperasi, Usaha Mikro, Nilai Tambah Perdagangan dan Daya Saing Industri”

3.2. Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah:

1. Meningkatnya kualitas koperasi.
2. Meningkatnya kapasitas usaha mikro.
3. Meningkatnya nilai tambah perdagangan.
4. Meningkatnya daya saing industri.
5. Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

3.3.1 Strategi Urusan Wajib Bidang Koperasi

1. Pendampingan Intensif dan Berkelanjutan

- Membentuk tim pendamping profesional yang turun langsung ke desa.
- Pelatihan berjenjang untuk pengurus koperasi.

2. Simplifikasi Regulasi dan Perizinan

- Menyederhanakan proses perizinan dan pelaporan untuk koperasi desa.

- Membuat sistem pelaporan yang sederhana dan mudah dipahami.

3. Akses Permodalan yang Terjangkau

- Skema KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan persyaratan yang diadaptasi untuk koperasi desa.
- Pembiayaan melalui skema *crowdfunding* atau *venture philanthropy*.

4. Penguatan Jaringan Pemasaran Digital

- Integrasi dengan platform e-commerce nasional.
- Pengembangan brand bersama untuk produk koperasi desa.

5. Sinergi dengan Program Pemerintah

- Memastikan koperasi desa menjadi bagian dari rantai pasok program nasional.
- Integrasi dengan program BUMN Bangun Desa.

Keberhasilan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sangat bergantung pada kemampuan mengatasi isu-isu strategis di tingkat tapak. Pendekatan yang holistik dan adaptif diperlukan untuk memastikan program ini benar-benar mampu memberdayakan ekonomi rakyat di tingkat desa.

Pemerintah memiliki peluang besar untuk mentransformasi koperasi desa menjadi *engine of growth* melalui kebijakan yang tepat, pendampingan yang intensif, dan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat desa.

3.3.2 Strategi Urusan Wajib Bidang Usaha Kecil dan Usaha Menengah

1. Penguatan Ekosistem Digital

- Pengembangan platform digital terpadu untuk pemasaran dan pembayaran
- Pelatihan literasi digital berbasis komunitas

2. Reformasi Regulasi

- Penyederhanaan perizinan dan harmonisasi peraturan
- Insentif berbasis kinerja dan dampak sosial

3. Pendampingan Terpadu

- Sistem pendampingan one-stop service untuk UMKM
- Kolaborasi triple helix (pemerintah-akademisi-bisnis)

4. Pengembangan Klaster Unggulan

- Pembentukan klaster industri berbasis potensi lokal
- Penguatan linkage antara UMKM dengan industri besar

5. Penguatan Akses Pembiayaan

- Skema pembiayaan syariah dan alternatif lainnya
- Penjaminan kredit melalui lembaga penjaminan daerah

Pelayanan UMKM di daerah memerlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan kebijakan pusat dengan karakteristik lokal. Keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan dalam:

1. **Koordinasi Implementasi** antara pemerintah pusat dan daerah
2. **Digitalisasi Inklusif** yang menjangkau UMKM pedesaan
3. **Pendampingan Berkelanjutan** yang tepat sasaran
4. **Integrasi Pasar** yang memanfaatkan program strategis nasional
5. **Innovasi Pembiayaan** yang adaptif dengan kebutuhan UMKM

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, UMKM dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi inklusif dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Indonesia.

5.3.3 Strategi Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

1. Penguatan Infrastruktur Logistik

- Pembangunan jaringan logistik terintegrasi
- Pengembangan *cold chain system* untuk komoditas segar
- Optimalisasi multimodal transport

2. Digitalisasi Perdagangan

- Pengembangan platform *e-commerce* lokal
- Pelatihan literasi digital bagi pelaku usaha
- Penyediaan infrastruktur digital yang merata

3. Reformasi Regulasi

- Harmonisasi peraturan pusat-daerah
- Penyederhanaan perizinan berusaha
- Penertiban pungutan tidak resmi

4. Penguatan Pasar Domestik

- Revitalisasi pasar tradisional
- Pengembangan sistem distribusi yang efisien
- Stabilisasi harga komoditas pokok

5. Peningkatan Kapasitas SDM

- Pelatihan dan sertifikasi aparatur
- Pendampingan kepada pelaku usaha
- Pengembangan entrepreneurship

Implementasi Program Prioritas

1. Integrasi dengan Program Nasional

- **Program Free Lunch/MBG:** Keterlibatan pelaku usaha lokal dalam *supply chain*
- **Food Estate:** Optimalisasi distribusi hasil produksi *food estate*
- **IKN Development:** Keterlibatan daerah dalam *supply chain* pembangunan IKN

2. Pengawasan dan Pengendalian

- **Sistem Early Warning:** Monitoring harga dan ketersediaan barang
- **Pengawasan Peredaran Barang:** Pencegahan barang ilegal dan tidak layak
- **Consumer Protection:** Perlindungan konsumen terutama dari praktik perdagangan tidak sehat

Pelayanan perdagangan di daerah akan menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan terintegrasi. Keberhasilan akan ditentukan oleh kemampuan dalam:

1. **Koordinasi lintas sektor** dan tingkat pemerintahan
2. **Pembangunan infrastruktur** yang merata dan berkualitas
3. **Transformasi digital** yang inklusif
4. **Reformasi regulasi** yang mendukung kemudahan berusaha
5. **Penguatan SDM** baik aparatur maupun pelaku usaha

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, pelayanan perdagangan di daerah dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

5.3.4 Strategi Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

1. Penguatan Infrastruktur

- **Industrial Estate:** Pengembangan kawasan industri terintegrasi
- **Energy Security:** Jaminan pasokan energi untuk industri
- **Digital Infrastructure:** Penyediaan infrastruktur digital

2. Peningkatan SDM

- **Vocational Training:** Pelatihan vokasi sesuai kebutuhan industri
- **Skill Certification:** Sertifikasi kompetensi tenaga kerja industri
- **Talent Attraction:** Program menarik minat SDM muda

3. Reformasi Regulasi

- **One Stop Service:** Penyederhanaan perizinan terintegrasi
- **Fiscal Incentives:** Insentif fiskal yang kompetitif
- **Regulatory Sandbox:** Wilayah pengembangan regulasi inovatif

4. Penguatan Rantai Pasok

- **Raw Material Security:** Jaminan ketersediaan bahan baku
- **Supply Chain Integration:** Integrasi rantai pasok lokal-global
- **Logistics Optimization:** Efisiensi jaringan logistik

5. Peningkatan Daya Saing

- **Quality Improvement:** Program peningkatan kualitas produk
- **Market Intelligence:** Penyediaan informasi pasar global
- **Export Promotion:** Promosi produk unggulan daerah

Implementasi Program Prioritas

1. Integrasi dengan Program Nasional

- **Program Free Lunch/MBG:** Keterlibatan industri pengolahan pangan
- **Food Estate:** Pengembangan industri berbasis hasil food estate
- **IKN Development:** Partisipasi industri material konstruksi

2. Transformasi Digital

- **Smart Factory:** Implementasi otomasi pabrik
- **IoT Adoption:** Pemanfaatan internet of things
- **Data Analytics:** Penggunaan big data untuk efisiensi

3. Ekonomi Hijau

- **Green Industry:** Adopsi praktik industri berkelanjutan
- **Circular Economy:** Penerapan ekonomi sirkular
- **Renewable Energy:** Penggunaan energi terbarukan

Tantangan Implementasi

1. Koordinasi Lintas Sektor

- **Sinkronisasi Kebijakan:** Koordinasi antar kementerian/lembaga
- **Keterlibatan Pemda:** Peran aktif pemerintah daerah
- **Partisipasi Swasta:** Keterlibatan dunia usaha

2. Pembiayaan dan Investasi

- **Funding Scheme:** Skema pembiayaan yang inovatif
- **Investment Climate:** Iklim investasi yang kondusif
- **Risk Management:** Manajemen risiko investasi

Pengembangan industri di daerah memerlukan pendekatan komprehensif yang mencakup:

1. **Infrastruktur yang memadai** untuk mendukung kegiatan industri
2. **SDM yang kompeten** dan siap menghadapi era digital
3. **Regulasi yang mendukung** kemudahan berinvestasi
4. **Rantai pasok yang kuat** dan terintegrasi
5. **Inovasi teknologi** yang berkelanjutan

Dengan mengatasi isu-isu strategis ini, sektor perindustrian di daerah dapat menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, sekaligus mendukung visi Indonesia menjadi negara industri tangguh di tingkat global.

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025 - 2029

Arah kebijakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba adalah :

3.4.1 Kebijakan Urusan Wajib Bidang Koperasi

Kebijakan harus berfokus pada penciptaan ekosistem yang memberdayakan, memodernisasi, dan memperkuat kontribusi koperasi serta UMKM terhadap perekonomian daerah.

Arah kebijakan ini dijabarkan ke dalam beberapa pilar strategis berikut:

1. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Koperasi

Kebijakan ini bertujuan menciptakan koperasi yang sehat, transparan, akuntabel, dan profesional.

- **Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pengelola:** Melaksanakan pelatihan berkelanjutan dalam hal manajemen modern, kepemimpinan, pengelolaan keuangan (SAK EMKM), penyusunan rencana usaha, dan tata kelola yang baik (*good cooperative governance*).
- **Digitalisasi Administrasi:** Mendorong dan memfasilitasi adopsi sistem informasi koperasi (SIK) atau aplikasi sederhana untuk mengelola administrasi, keuangan, dan keanggotaan secara digital, meningkatkan transparansi dan efisiensi.
- **Penyuluhan dan Pendampingan Intensif:** Memperkuat peran penyuluh koperasi dengan pendekatan *coaching* dan *mentoring* yang berkelanjutan, bukan hanya sekadar penyuluhan satu arah. Fokus pada koperasi-koperasi yang berpotensi tetapi masih lemah secara kelembagaan.
- **Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi:** Memperkuat pemahaman dan praktik identitas koperasi yang sesungguhnya (prinsip keanggotaan yang terbuka, demokratis, pembagian Sisa Hasil Usaha/SHU yang adil, dan kepedulian terhadap komunitas).

2. Peningkatan Akses Permodalan dan Keuangan

Kebijakan ini difokuskan untuk membuka keran pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan koperasi.

- **Fasilitasi Koneksi dengan Lembaga Keuangan:** Menjembatani koperasi dengan bank umum, Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan lembaga keuangan non-bank (leasing, modal ventura, fintech syariah) melalui forum temu bisnis, penjaminan dengan Jamkrindo/Jamkrida, dan program linkage.
- **Pengembangan Lembaga Keuangan Mikat (LKM) Koperasi yang Sehat:** Memperkuat Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi sebagai tulang punggung pembiayaan mikro di

tingkat akar rumput. Kebijakan termasuk pengawasan yang ketat untuk mencegah praktik rentenir.

- **Optimalisasi Bantuan Bergulir Pemerintah Daerah:** Mengelola dana bergulir daerah dengan mekanisme yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kinerja (*revolving fund* yang benar-benar berputar dan berkembang).
- **Memperkenalkan Skema Pembiayaan Alternatif:** Mendorong skema *crowdfunding* syariah, atau investasi sosial untuk koperasi yang memiliki dampak sosial dan lingkungan yang jelas.

3. Pengembangan Usaha dan Pemasaran

Kebijakan ini mendorong koperasi tidak hanya sebagai unit simpan-pinjam, tetapi sebagai pelaku usaha yang tangguh dan inovatif.

- **Diversifikasi Produk dan Jasa:** Mendampingi koperasi untuk mengembangkan usaha inti yang sesuai dengan potensi unggulan daerah (seperti koperasi pertanian, perikanan, wisata, kerajinan, dan jasa).
- **Digitalisasi Pemasaran:** Memacu koperasi untuk *go digital* dengan memanfaatkan e-commerce (Tokopedia, Shopee, dll.), media sosial untuk pemasaran, dan aplikasi pesan-antar. Membangun *marketplace* khusus produk koperasi daerah bisa menjadi opsi.
- **Pembentukan dan Penguatan Jaringan Pemasaran:** Membentuk klaster-klaster usaha berbasis koperasi untuk mencapai skala ekonomi. Memfasilitasi keikutsertaan koperasi dalam pameran baik lokal, nasional, maupun internasional.
- **Penguatan Rantai Nilai:** Mendukung koperasi untuk berperan di seluruh rantai nilai, dari hulu ke hilir. Misalnya, koperasi tani tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mengolah dan memasarkan produk jadi.

4. Inovasi dan Transformasi Digital

Kebijakan ini penting untuk menjadikan koperasi relevan di era ekonomi digital.

- **Pelatihan Literasi Digital:** Melakukan pelatihan praktis untuk pengurus dan anggota dalam menggunakan perangkat digital untuk operasional dan pemasaran.
- **Mendorong Terbentuknya Koperasi Platform (*Platform Cooperative*):** Menginisiasi atau mendukung pembentukan koperasi yang model bisnisnya berbasis platform digital, misalnya koperasi driver online, koperasi penyedia jasa kreatif digital, dll.
- **Integrasi Data:** Membangun basis data terpadu koperasi dan UMKM daerah yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat (melalui Kementerian Koperasi dan UKM) untuk memudahkan pemetaan, pembinaan, dan monitoring.

5. Sinergi dan Kemitraan Strategis

Kebijakan ini menekankan bahwa penguatan koperasi tidak bisa dilakukan sendiri oleh Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian.

- **Kemitraan dengan Akademisi/Universitas:** Melibatkan kampus melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik, penelitian, dan pusat inkubasi bisnis untuk koperasi dan UMKM.
- **Kolaborasi dengan Dunia Usaha (CSR):** Menjalin kemitraan dengan perusahaan swasta/BUMN untuk program Corporate Social Responsibility (CSR) yang diarahkan untuk pengembangan koperasi.
- **Sinergi dengan Dinas Lainnya:** Berkoordinasi erat dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Pertanian, Dinas Tenaga Kerja, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Daerah untuk program yang terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

- **Pemberdayaan Peran Gerakan Koperasi:** Berkolaborasi dengan Dekopininda dan organisasi gerakan koperasi lainnya di daerah sebagai mitra pembinaan dan advokasi.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Anggota

Kebijakan ini berfokus pada aspek manusia sebagai modal utama koperasi.

- **Program Kaderisasi:** Menciptakan program untuk menarik minat generasi muda (milennial dan Gen Z) untuk terlibat dalam koperasi, baik sebagai anggota, pengelola, maupun pengurus.
- **Pelatihan Berbasis Kompetensi:** Menyelenggarakan pelatihan dengan sertifikasi keahlian tertentu (seperti digital marketing, pembukuan, pengolahan produk) untuk meningkatkan kapasitas anggota.
- **Penyadaran sebagai Pemilik (*Ownership Awareness*):** Melakukan edukasi bahwa anggota adalah pemilik koperasi, sehingga memiliki tanggung jawab dan hak untuk mengontrol dan memajukan koperasinya.

Arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba untuk Renstra 2025-2029 harus bergeser dari pendekatan **regulasi dan pembinaan konvensional** menuju pendekatan **fasilitasi, inovasi, dan kolaborasi**.

Tujuannya adalah menciptakan koperasi yang:

- **Modern** secara teknologi dan tata kelola.
- **Berkelanjutan** secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.
- **Berdikari** dan mampu bersaing di pasar.
- **Memberikan nilai tambah** yang nyata bagi anggota dan masyarakat daerah.

Dengan fokus pada enam pilar kebijakan di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat menyusun program-

program kerja yang lebih terukur, terarah, dan *impactful* untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029, sekaligus berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba menetapkan **“Meningkatnya kualitas koperasi”** dengan *IK: Persentase Koperasi yang berkualitas*, menjadi Sasaran Renstra Urusan Wajib Bidang Koperasi.

Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	100	100	100	100	100

a. terlaksananya peningkatan kapasitas SDM koperasi

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.05.2.01.001 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi					
Indikator Sub kegiatan :	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	50	25	25	25	25	25
Catatan:	Peningkatan SDM Koperasi dilakukan melalui Pelatihan					

b. Terlaksananya fasilitasi kemitraan koperasi dan keanggotaannya

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.06.2.01.0004 Fasilitasi kemitraan koperasi yang keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah koperasi yang difasilitasi kemitraannya					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	10	10	10	10	10

Catatan:	Kemitraan koperasi untuk mendukung dan mempermudah kerjasama antara sesama koperasi dan dan pihak lain (pemerintah dan swasta)
----------	--

c. terlaksananya pemeriksaan dan pengawasan koperasi

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.03.2.01.0004 Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	10	10	10	10	10	10
Catatan:	Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi meliputi aspek legalitas, kelembagaan, pengelolaan usaha, hingga kondisi keuangan koperasi					

d. terlaksananya fasilitasi akses permodalan koperasi

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.06.2.01.0007 Fasilitasi Akses permodalan koperasi yang keanggotaannya daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	0	0	0	0	0
Catatan:	Fasilitasi permodalan diberikan kepada Koperasi simpan pinjam maupun koperasi sector rill untuk mempermudah mendapat akses permodalan					

3.4.2 Arah Kebijakan Urusan Wajib Bidang UMKM

Kebijakan harus berfokus pada menciptakan ekosistem yang memungkinkan UMKM naik kelas, menjadi tangguh, berdaya saing, dan terintegrasi dengan ekonomi digital dan rantai nilai global.

Kebijakan ini dijalankan melalui enam pilar strategis utama:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kelembagaan UMKM

Kebijakan ini bertujuan membangun fondasi usaha yang kuat dan profesional.

- **Pendampingan dan Pelatihan Berkelanjutan:** Melaksanakan program *coaching* dan *mentoring* yang berkelanjutan, bukan sekadar pelatihan satu hari. Materi meliputi manajemen bisnis, keuangan (pembukuan sederhana, SAK EMKM), perpajakan (kebijakan PP 23/2018), dan penyusunan rencana usaha.
- **Formalisasi Bisnis:** Mendorong dan memfasilitasi UMKM untuk memiliki legalitas usaha (NIB, NPWP) agar dapat mengakses program pemerintah, pembiayaan, dan berpartisipasi dalam rantai pasok formal.
- **Pembangunan Mindset Kewirausahaan:** Menyasar generasi muda untuk menjadi wirausaha baru (*startup founder*) dan mendorong UMKM tradisional untuk berinovasi dan memiliki mindset growth.

2. Perluasan Akses Permodalan dan Pembiayaan

Kebijakan ini difokuskan untuk membuka akses ke sumber pembiayaan yang terjangkau dan sesuai kebutuhan pertumbuhan UMKM.

- **Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR):** Memperkuat peran sebagai fasilitator dengan menjembatani UMKM dan perbankan penyalur KUR, termasuk membantu menyiapkan dokumen administrasi dan proposal usaha.

- **Pengembangan Lembaga Pembiayaan Non-Bank:** Memperkenalkan dan memfasilitasi akses ke skema pembiayaan alternatif seperti *venture capital* untuk startup, modal ventura syariah, *crowdfunding*, dan dana abadi UMKM (*revolving fund*) daerah.
- **Penyediaan Informasi yang Terintegrasi:** Membuat platform digital atau pusat informasi yang memetakan semua skema pembiayaan (dari bank, fintech, pemda, pusat) yang dapat diakses oleh UMKM.

3. Penguatan Pemasaran dan Akses Pasar

Kebijakan ini mendorong UMKM untuk *go beyond* pasar lokal dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

- **Digitalisasi Pemasaran (Go-Digital):** Memacu adopsi teknologi digital dengan pelatihan pemasaran media sosial, optimasi e-commerce (Tokopedia, Shopee, dll.), dan pembuatan website. Memfasilitasi kerja sama dengan platform logistik untuk ongkir terjangkau.
- **Pembentukan Jaringan dan Kemitraan:** Memfasilitasi UMKM untuk masuk dalam rantai pasok modern (supermarket, minimarket, hotel) dan industri besar melalui Business Matching Forum. Membentuk klaster-klaster UMKM berdasarkan komoditas unggulan untuk mencapai skala ekonomi.
- **Partisipasi dalam Pameran:** Memfasilitasi dan mensubsidi partisipasi UMKM dalam pameran baik daring (*virtual expo*) maupun luring, mulai dari tingkat daerah, nasional, hingga internasional.
- **Pengembangan Branding dan Design Thinking:** Membantu UMKM dalam membangun merek, kemasan, dan cerita (*storytelling*) yang menarik untuk meningkatkan nilai jual dan daya saing produk.

4. Adopsi Teknologi dan Inovasi

Kebijakan ini penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk UMKM.

- **Modernisasi Peralatan dan Proses Produksi:** Memberikan bantuan mesin dan peralatan yang lebih modern atau memfasilitasi program *machinery sharing* untuk meningkatkan kapasitas dan standar kualitas produksi.
- **Pelatihan Teknologi Terapan:** Menyelenggarakan pelatihan pemanfaatan teknologi tepat guna, baik untuk produksi (pengolahan pangan, teknik pembuatan) maupun administrasi (aplikasi kasir, inventory).
- **Dukungan bagi Startup dan UMKM Kreatif Digital:** Membuat program inkubasi dan akselerasi khusus untuk startup dan UMKM yang bergerak di bidang ekonomi kreatif, teknologi, dan digital.

5. Pengembangan Ekosistem dan Sinergi Kebijakan

Kebijakan ini menekankan bahwa penguatan UMKM memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

- **Sinergi dengan Dinas Lainnya:** Berkoordinasi erat dengan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian, dengan Dinas Tenaga Kerja, dan Dinas Pariwisata untuk menciptakan program terpadu yang menyeluruh (misalnya: paket wisata yang memasukkan produk UMKM lokal).
- **Kemitraan dengan Akademisi dan Dunia Usaha:** Melibatkan kampus sebagai mitra penelitian, pengembangan produk, dan tenaga magang. Menjalin kemitraan dengan perusahaan untuk program CSR yang terarah dan pemenuhan rantai pasok.
- **Optimalisasi Peraturan Daerah:** Mendorong terbitnya Perda yang mendukung UMKM, seperti Perda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan UMKM, atau Perda yang mewajibkan penggunaan produk UMKM lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

- **Pembangunan Infrastruktur Pendukung:** Memperjuangkan pembangunan sentra-sentra UMKM, pasar modern yang representatif, dan kawasan industri kecil untuk mempermudah akses dan distribusi.

6. Peningkatan Daya Saing Berbasis Keunggulan Lokal

Kebijakan ini memastikan UMKM mampu bersaing dengan memanfaatkan potensi dan identitas daerah.

- **Pemetaan dan Pengembangan Klaster Unggulan:** Memetakan potensi UMKM unggulan daerah (seperti batik, kerajinan tangan, kuliner khas, kopi, dll.) dan mengembangkannya secara terintegrasi dari hulu ke hilir.
- **Perlindungan Kekayaan Intelektual (KI):** Memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak cipta, merek, dan indikasi geografis untuk melindungi produk lokal dari pemalsuan dan meningkatkan nilai tambahnya.
- **Penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan:** Mendampingi UMKM, khususnya di sektor pangan, untuk mendapatkan sertifikasi halal, P-IRT, dan SNI agar produknya dapat diterima oleh pasar yang lebih luas.

Arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian untuk periode 2025-2029 harus bergeser dari pendekatan **sosial dan charity** menuju pendekatan **pengembangan bisnis yang berkelanjutan**. Tujuannya adalah menciptakan UMKM yang:

- **Berkelas** dan berlegalitas formal.
- **Go Digital** dan melek teknologi.
- **Go National** dan **Go Global** dengan jangkauan pasar yang luas.
- **Go Green** yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.
- **Tangguh** dalam menghadapi guncangan ekonomi.

Dengan fokus pada enam pilar kebijakan di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat menyusun program-program kerja yang terukur, inklusif, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu mencapai target Renstra dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pemerataan kesejahteraan di daerah.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian menetapkan **“Meningkatnya kapasitas usaha mikro”** dengan *IK: Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha*, sebagai Sasaran Renstra Urusan Wajib Bidang UKM.

Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	100	100	100	100	100

a. terlaksananya fasilitasi kemitraan usaha mikro

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah Unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	3	3	2	2	2
Catatan:	Kemitraan usaha mikro adalah proses kerjasama antara pelaku usaha dan pihak lain (swasta dan pemerintah)					

b. terlaksananya pendampingan perizinan usaha mikro

Dilaksanakan dengan a):	Sub Kegiatan 2.17.07.2.01.0003 Fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro					
Indikator Subkegiatan:	Jumlah usaha mikro yang telah mendapat perizinan					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	3	3	0	0	0
Catatan:	Perizinan usaha mikro yang dibutuhkan usaha mikro antara lain Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, Izin edar BPOM dan izin merek (HAKI)					

Dilaksanakan dengan b):	Sub Kegiatan 2.17.07.2.01.0014 Penyusunan basis data usaha mikro					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah Unit Usaha mikro yang terdata					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	5	5	5	5	5	5
Catatan:	Jumlah usaha mikro yang sudah memperoleh perizinan dan yang belum memiliki perizinan					

c. terlaksananya perizinan usaha mikro *IK : Jumlah SOP perizinan usaha mikro*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.07.2.01.0002 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah Unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	3	3	2	2	2
Catatan:	Kemitraan usaha mikro adalah proses kerjasama antara pelaku usaha dan pihak lain (swasta dan pemerintah)					

d. terlaksananya pelatihan SDM usaha mikro , *IK : Jumlah SDM yang memahami pengetahuan usaha mikro dan kewirausahaan*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain teknologi					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	5	10	10	10	10	20
Catatan:	Pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam berbagai aspek bisnis seperti, pemasaran, keuangan, inovasi dan teknologi digital					

e. terlaksananya pemberian bantuan peralatan dan bahan bagi usaha mikro
IK: Laporan

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.08.2.01.0006 Produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain teknologi					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	5	10	10	10	10	20
Catatan:	Pemberian bantuan usaha mikro diberikan kepada pelaku usaha yang telah beroperasi untuk meningkatkan kualitas produk					

3.4.3 Arah Kebijakan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan

Arah kebijakan harus berfokus pada menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, efisien, berdaya saing, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan ini dijalankan melalui enam pilar strategis utama:

1. Penguatan Stabilitas Pasokan dan Harga Bahan Pokok Sembako

Kebijakan ini bertujuan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan pokok masyarakat, yang merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi.

- **Pemantauan dan Early Warning System:** Memperkuat sistem pemantauan pasokan dan harga secara real-time di tingkat grosir dan eceran. Membangun sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengantisipasi kelangkaan dan gejolak harga.
- **Optimalisasi Operasi Pasar dan Pengelolaan Stok:** Melakukan operasi pasar secara efektif dan tepat sasaran. Memperkuat peran lembaga logistik daerah (jika ada) atau gudang penyangga (*buffer stock*) untuk intervensi pasar.
- **Penguatan Rantai Pasok Distribusi:** Memetakan dan merampingkan rantai distribusi dari produsen ke konsumen untuk mengurangi biaya distribusi dan margin yang tidak perlu. Memfasilitasi kemitraan antara distributor besar dengan pasar tradisional dan UMKM.

2. Modernisasi dan Revitalisasi Pasar Rakyat (Pasar Tradisional)

Kebijakan ini mentransformasi pasar tradisional menjadi bersih, higienis, nyaman, dan mampu bersaing dengan pasar modern.

- **Revitalisasi Fisik Infrastruktur:** Melakukan perbaikan infrastruktur dasar (drainase, penerangan, air bersih, sanitasi) dan tata ruang yang baik untuk menciptakan lingkungan berbelanja yang menarik.
- **Peningkatan Manajemen dan Tata Kelola:** Mendorong penerapan manajemen pasar yang profesional, baik oleh pemerintah daerah maupun melalui kerjasama dengan BUMD atau swasta dengan skema Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

- **Go-Digital Pasar Tradisional:** Memperkenalkan pembayaran digital (QRIS, e-wallet) dan memfasilitasi pedagang untuk memanfaatkan platform e-commerce atau *online delivery* untuk memperluas jangkauan penjualan.

3. Pengembangan Perdagangan Modern yang Berkeadilan

Kebijakan ini mengatur dinamika perdagangan modern agar sehat, berimbang, dan memberikan manfaat bagi seluruh pelaku usaha.

- **Penataan Ruang dan Izin Usaha:** Menerapkan peraturan zoning yang ketat untuk pendirian minimarket, supermarket, dan mall agar tidak mematikan pasar tradisional dan UKM di sekitarnya.
- **Penerapan Aturan Kemitraan yang Adil:** Mengawasi dan menegakkan peraturan mengenai kemitraan antara ritel modern dengan supplier dan UMKM lokal, memastikan hubungan usaha yang sehat dan tidak monopolistik.
- **Promosi Produk Lokal di Ritel Modern:** Memfasilitasi dan mewajibkan ritel modern untuk mengalokasikan ruang khusus (*special display*) untuk produk-produk unggulan UMKM daerah.

4. Akselerasi Perdagangan Elektronik (E-Commerce) dan Ekonomi Digital

Kebijakan ini memastikan daerah tidak tertinggal dalam transaksi digital dan mampu memanfaatkannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Literasi Digital bagi Pelaku Usaha:** Menyelenggarakan pelatihan intensif bagi pedagang dan UMKM untuk melek digital, termasuk manajemen toko online, digital marketing, keamanan siber, dan pemenuhan regulasi e-commerce.

- **Pengembangan Logistik dan Pendukung E-Commerce:** Mendukung pengembangan infrastruktur logistik dan gudang fulfillment di daerah untuk menekan biaya pengiriman dan mempercepat distribusi produk lokal.
- **Perlindungan Konsumen di Dunia Maya:** Meningkatkan pengawasan terhadap transaksi *e-commerce* dan menyediakan saluran pengaduan untuk melindungi konsumen dari penipuan online, barang tiruan, dan praktik perdagangan yang tidak sehat.

5. Peningkatan Daya Saing Produk dan Ekspor Daerah

Kebijakan ini mendorong produk unggulan daerah tidak hanya menguasai pasar lokal, tetapi juga mampu menembus pasar nasional dan internasional.

- **Branding dan Pemasaran Produk Unggulan:** Membangun merek kolektif (*collective branding*) untuk produk-produk andalan daerah (seperti "Citarasa Jawa Barat", "Khas Kalimantan", dll.) dan mempromosikannya secara agresif melalui pameran dan platform digital.
- **Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi:** Mendampingi pelaku usaha untuk memenuhi standardisasi mutu, keamanan pangan (P-IRT, SNI, Halal), dan sertifikasi yang diperlukan untuk ekspor.
- **Jembatan Ekspor dan Business Matching:** Menjadi fasilitator yang aktif menjembatani produsen lokal dengan buyer, distributor, dan kedutaan besar negara tujuan ekspor. Menyelenggarakan forum temu bisnis yang terfokus.

6. Penegakan Aturan dan Perlindungan Konsumen

Kebijakan ini menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil serta melindungi hak-hak konsumen.

- **Pengawasan Barang Beredar dan Jasa:** Melakukan pengawasan dan pemeriksaan rutin terhadap barang di pasaran untuk mencegah peredaran barang palsu, substandar, dan berbahaya. Termasuk pengawasan metrologi legal (timbangan, takaran).
- **Penindakan terhadap Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat:** Mengawasi pasar untuk mendeteksi praktik penimbunan, manipulasi harga, dan persaingan curang.
- **Sosialisasi dan Edukasi Konsumen Cerdas:** Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai konsumen melalui berbagai media dan channel edukasi.

Arah Kebijakan Urusan Pilihan Bidang Perdagangan untuk periode 2025-2029 harus bergeser dari pendekatan **regulasi dan pengawasan semata** menjadi pendekatan **fasilitasi, akselerasi, dan kolaborasi**. Tujuannya adalah menciptakan ekosistem perdagangan yang:

- **Stabil** dalam pasokan dan harga bahan pokok.
- **Adil** bagi seluruh pelaku usaha, dari pedagang tradisional hingga korporasi modern.
- **Modern** dan adaptif terhadap teknologi digital.
- **Berdaya Saing** di tingkat nasional dan global.
- **Terlindungi** bagi konsumen dan pelaku usaha yang jujur.

Dengan fokus pada enam pilar kebijakan di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat menyusun program-program kerja yang terukur, efektif, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 dapat tercapai.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba menetapkan **“Meningkatnya nilai tambah perdagangan”** dengan *IK: Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB*, sebagai Sasaran Renstra Urusan Wajib Bidang UKM.

Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12,56	12,56	12,61	12,66	12,71	12,76

a. terlaksananya pengawasan barang bersubsidi *IK : Laporan*

Dilaksanakan dengan a):	Sub Kegiatan 3.30.04.2.03.0003 Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi					
Indikator Sub kegiatan :	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12	12	12	12	12	12
Catatan:	Untuk terlaksananya pengawasan barang bersubsidi maka dibutuhkan laporan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor setiap bulannya					

Dilaksanakan dengan b):	Sub Kegiatan 3.30.04.2.01.0001 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					
Indikator Sub kegiatan :	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12	12	12	12	12	12
Catatan:	Untuk terlaksananya pengawasan barang bersubsidi maka dibutuhkan laporan penyaluran Gas LPG 3 Kg dari Agen/ Penyalur setiap bulannya					

b. terlaksananya promosi produk unggulan daerah *IK : Jumlah UMKM*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 3.30.07.2.01.0005 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi penggunaan produk dalam negeri ditingkat kabupaten/Kota					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	7	30	50	60	100	200
Catatan:	Untuk terlaksananya promosi produk unggulan daerah maka dibutuhkan UMKM yang difasilitasi setiap tahunnya.					

c.tersedianya sarana prasarana perdagangan, *IK: Unit*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 3.30.03.2.01.0001 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan					
Indikator Sub kegiatan :	Jumlah sarana distribusi perdagangan					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	1	1	2	2	2
Catatan:	Untuk Tersedianya sarana prasarana perdagangan maka dibutuhkan pembangunan pasar setiap tahun.					

d. terlaksananya identifikasi harga kebutuhan pokok dan barang penting *IK : Laporan*

Dilaksanakan dengan a):	Sub Kegiatan 3.30.04.2.02.0002 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
Indikator Sub kegiatan :	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	12	12	12	12	12	12

Catatan:	Untuk terlaksananya identifikasi harga kebutuhan pokok dan barang penting maka dibutuhkan laporan hasil pemantauan harga bahan pokok setiap bulannya.
----------	---

Dilaksanakan dengan b):	Sub Kegiatan 3.30.04.2.02.0003 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	2	0	2	2	2	2
Catatan:	Untuk terlaksananya identifikasi harga kebutuhan pokok dan barang penting maka dibutuhkan laporan pelaksanaan pasar murah menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) khususnya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal/Tahun Baru setiap tahunnya.					

e. tersedianya pengujian (tera/tera ulang) alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya *IK : Unit*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 3.30.06.2.01.0001 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang					
Indikator Sub kegiatan:	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	414	510	560	610	660	710
Catatan:	Untuk terlaksananya pengujian (Tera/Tera ulang) alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya maka diperlukan pelaksanaan tera/tera ulang terhadap alat UTP					

f. terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana perdagangan *IK : Unit*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 3.30.03.2.01.0002 Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan					
Indikator Sub kegiatan:	Jumlah fasilitas pengelolaan sarana distribusi perdagangan					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	13	13	13	13	13	13
Catatan:	Untuk tersedianya sarana prasarana perdagangan maka dibutuhkan fasilitas terhadap pasar rakyat aktif yang dikelola oleh pemda setiap tahun.					

3.4.4 Arah Kebijakan Urusan Pilihan Bidang Perindustrian

Arah kebijaiakan harus berfokus pada transformasi struktur industri daerah yang berdaya saing, bernilai tambah tinggi, inklusif, dan berkelanjutan.

Kebijakan ini dijalankan melalui enam pilar strategis utama:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Industri (SDMI)

Kebijakan ini bertujuan menciptakan tenaga kerja terampil, adaptif, dan siap menghadapi revolusi industri 4.0.

- **Penyelarasan Kurikulum Pendidikan Vokasi:** Berkolaborasi erat dengan SMK dan politeknik untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan riil dunia industri melalui program Teaching Factory dan magang industri yang intensif.
- **Program Reskilling dan Upskilling:** Melaksanakan pelatihan berbasis kompetensi untuk tenaga kerja industri yang ada, khususnya pada bidang digitalisasi, otomasi, robotika, dan analisis data.
- **Pembangunan Talent Pool:** Membuat pemetaan bakat dan kebutuhan skill di daerah serta mengembangkan program untuk menarik dan menahan talenta industri agar tidak bermigrasi ke daerah lain.

2. Akselerasi Adopsi Teknologi dan Inovasi Industri 4.0

Kebijakan ini mendorong industri, khususnya IKM, untuk melakukan modernisasi guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

- **Dukungan Modernisasi Peralatan dan Mesin:** Memberikan insentif atau skema bantuan bergulir untuk pergantian mesin tua dengan teknologi yang lebih produktif dan ramah lingkungan (*green technology*).
- **Digitalisasi Proses Bisnis:** Mendorong implementasi teknologi digital dalam proses produksi (ERP, IoT sensors), manajemen rantai pasok, dan pemasaran (e-commerce).
- **Pusat Inovasi dan Fabrikasi Digital (*Maker Space*):** Membangun atau memfasilitasi pusat inovasi yang dilengkapi dengan peralatan prototyping (seperti printer 3D, laser cut) yang dapat diakses oleh IKM dan startup untuk pengembangan produk.

3. Pengembangan Klaster Industri dan Rantai Nilai Unggulan

Kebijakan ini memfokuskan sumber daya pada pengembangan industri berbasis keunggulan komparatif daerah.

- **Pemetaan dan Fokus pada Komoditas Inti:** Menetapkan 2-3 sektor industri unggulan prioritas (misalnya: industri pengolahan hasil pertanian/perikanan, industri mebel, industri fashion, elektronika) berdasarkan potensi sumber daya alam dan kearifan lokal.
- **Penguatan Integrasi Hulu-Hilir:** Mengembangkan klaster industri yang terintegrasi, dimana output dari satu industri menjadi input bagi industri lainnya (*industrial symbiosis*), mengurangi biaya logistik dan menciptakan ketahanan rantai pasok.
- **Pembangunan Kawasan Industri Kecil (KIK) dan Sentra IKM:** Menyediakan infrastruktur yang memadai (listrik, air, jalan, internet)

di kawasan khusus untuk IKM agar dapat beroperasi secara efisien dan terkonsentrasi.

4. Peningkatan Investasi dan Ekspor Berbasis Nilai Tambah

Kebijakan ini menarik investasi yang strategis dan mendorong produk industri naik kelas dari mentah ke olahan.

- **Promosi Investasi yang Selektif dan Targeted:** Tidak hanya mengejar kuantitas investasi, tetapi fokus pada investasi yang dapat mengisi celah dalam rantai nilai, transfer teknologi, dan menyerap tenaga kerja terampil.
- **Fasilitasi Ekspor Produk Olahan:** Mendampingi pelaku industri untuk memenuhi standar dan sertifikasi internasional (ISO, SNI, Halal, FDA, dll.), serta memberikan akses informasi pasar global.
- **Pengembangan Design dan Branding:** Membantu industri, khususnya IKM, dalam mendesain kemasan, merek, dan cerita (*storytelling*) yang kuat untuk meningkatkan nilai jual dan diferensiasi produk di pasar global.

5. Penerapan Prinsip Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Kebijakan ini memastikan pembangunan industri sejalan dengan komitmen keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

- **Insentif untuk Efisiensi Energi dan Pengelolaan Limbah:** Memberikan penghargaan atau insentif fiskal/non-fiskal bagi industri yang menerapkan proses produksi ramah lingkungan, daur ulang limbah, dan ekonomi sirkular.
- **Penerapan Teknologi Bersih (*Cleaner Production*):** Mensosialisasikan dan mendampingi industri untuk mengurangi emisi, mengoptimalkan penggunaan energi dan air, serta memanfaatkan limbah sebagai bahan baku baru.

- **Sertifikasi Industri Hijau:** Mendorong dan memfasilitasi industri untuk mendapatkan sertifikasi terkait praktik lingkungan yang baik.

6. Penguatan Ekosistem Industri dan Sinergi Kebijakan

Kebijakan ini menekankan bahwa penguatan industri memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.

- **Koneksi Riset dan Pengembangan (R&D):** Menjembatani kolaborasi antara industri dengan universitas dan lembaga penelitian untuk inovasi produk dan proses.
- **Sinergi dengan Dinas Terkait:** Berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja untuk SDM, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian untuk pemasaran dan pemberdayaan IKM, Dinas Lingkungan Hidup untuk regulasi.
- **Kemudahan Berusaha dan Layanan One-Stop Service (OSS):** Memastikan perizinan berusaha untuk sektor industri di daerah dapat diproses dengan cepat, transparan, dan terintegrasi dengan sistem OSS pusat.
- **Penguatan Data Industri:** Membangun basis data industri yang akurat dan terupdate untuk kebutuhan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan yang tepat sasaran.

Arah kebijakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian untuk periode 2025-2029 harus mengalami transformasi dari pendekatan **pengawasan dan pembinaan konvensional** menuju pendekatan **fasilitasi, akselerasi, dan katalisasi**. Tujuannya adalah menciptakan struktur industri daerah yang:

- **Berdaya Saing Tinggi** dengan mengadopsi teknologi dan inovasi.
- **Berorientasi Ekspor** dan berintegrasi dengan rantai nilai global.
- **Inklusif** dengan mengangkat dan memberdayakan IKM.
- **Hijau dan Berkelanjutan** yang bertanggung jawab secara lingkungan.

- **Tangguh** dalam menghadapi disrupsi dan guncangan ekonomi global.

Dengan fokus pada enam pilar kebijakan di atas, Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dapat menyusun program-program kerja yang terukur, impactful, dan mampu mentransformasi wajah perindustrian daerah, sehingga tujuan dan sasaran Renstra 2025-2029 dapat tercapai secara efektif.

Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba menetapkan **“Meningkatnya daya saing industri”** dengan *IK: Rasio PDRB Industri Pengolahan*, sebagai Sasaran Renstra Urusan Wajib Bidang Perindustrian.

Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	11,55	11,57	11,58	11,61	11,63	11,67

- a. terlaksananya pengawasan usaha yang memiliki izin industri *IK : Jumlah*

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 3.31.03.2.01.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan:	Jumlah dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	NA	1	1	1	1	1
Catatan:	Pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan terhadap koperasi meliputi aspek legalitas, kelembagaan, pengelolaan usaha, hingga kondisi keuangan koperasi					

b. terlaksananya fasilitasi standarisasi dan legalitas industri kecil menengah
Ik : Jumlah

Dilaksanakan dengan:	Sub Kegiatan 2.17.06.2.01.0007 Kabupaten/Kota					
Indikator Subkegiatan :	Jumlah Koperasi yang difasilitasi permodalannya					
Target:	2024	2026	2027	2028	2029	2030
	0	16	21	26	31	36
Catatan:	Fasilitasi permodalan diberikan kepada Koperasi simpan pinjam maupun koperasi sector riil untuk mempermudah mendapat akses permodalan					

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program

Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba (Tabel 4.1):

TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					5.194.187.110,00		5.278.010.000,00		5.345.813.000,00		5.474.722.000,00		5.879.496.012,00	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.124.075.490,00		5.184.747.490,00		5.260.813.000,00		5.307.722.000,00		5.461.496.012,00	
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP (Angka)	72.00	77.30	79.30	5.124.075.490,00	80.90	5.184.747.490,00	82.20	5.260.813.000,00	83.30	5.307.722.000,00	85.00	5.461.496.012,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	12.56	12.56	12.56	5.000.000,00	12.61	2.000.000,00	12.66	5.000.000,00	12.71	5.000.000,00	12.76	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					5.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	
Meningkatnya kualitas koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi (%)	0	0	25.57	5.000.000,00	25.57	2.000.000,00	25.57	3.000.000,00	25.57	3.000.000,00	25.57	4.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					16.111.620,00		35.262.510,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (Persentase)	13.45	13.45	13.45	16.111.620,00	14.45	35.262.510,00	15.45	25.000.000,00	16.45	25.000.000,00	17.45	25.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten (%)	12.56	12.56	12.56		12.61		12.66		12.71		12.76		Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					5.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00		29.000.000,00	
Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	6.73	6.73	6.73	5.000.000,00	8.00	12.000.000,00	8.60	12.000.000,00	8.90	24.000.000,00	9.00	29.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					9.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya pemberdayaan usaha dan usaha mikro	Persentase usaha mikro dan kecil (%)	1.8	1.8	1	9.000.000,00	1.2	12.000.000,00	1.3	10.000.000,00	1.4	10.000.000,00	1.5	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	
Meningkatnya kapasitas Usaha mikro	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha (%)	6.63	6.63	6.63	30.000.000,00	6.83	30.000.000,00	7.63	30.000.000,00	7.83	100.000.000,00	8.63	300.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					105.538.890,00		246.000.000,00		228.603.000,00		792.854.000,00		1.892.818.988,00	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN					5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelajaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) (%)	34.77	45	55	5.000.000,00	65	10.000.000,00	75	10.000.000,00	85	15.000.000,00	95	15.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					19.538.890,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		379.390.400,00	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Jumlah sarana perdagangan yang difasilitasi (Unit)	2	4	6	19.538.890,00	8	25.000.000,00	10	25.000.000,00	12	50.000.000,00	14	379.390.400,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					36.000.000,00		71.000.000,00		61.000.000,00		71.000.000,00		101.000.000,00	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	2.39	2.37	2.35	36.000.000,00	2.33	71.000.000,00	2.31	61.000.000,00	2.29	71.000.000,00	2.27	101.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					-		50.000.000,00		42.603.000,00		216.854.000,00		357.428.588,00	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi (Pelaku Usaha)	0	0	10	-	10	50.000.000,00	10	42.603.000,00	10	216.854.000,00	10	357.428.588,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase alat ukur takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku (Persentase)	42.75	42.75	42.75	40.000.000,00	42.75	40.000.000,00	42.75	40.000.000,00	43.00	40.000.000,00	43.25	40.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					5.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Jumlah produk lokal yang dapat dipromosikan di tingkat regional dan tingkat nasional (Jenis)	7	7	10	5.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	10	400.000.000,00	10	1.000.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perdagangan
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					31.603.000,00		68.603.000,00		68.603.000,00		127.000.000,00		127.000.000,00	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					4.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	
Meningkatnya realisasi pertumbuhan industri	Pertumbuhan industri (%)	7.27	7.27	0	4.000.000,00	7.35	25.000.000,00	7.43	25.000.000,00	7.51	65.000.000,00	7.58	65.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI					-		16.000.000,00		16.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (Persentase)	100	100	100	-	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					27.603.000,00		27.603.000,00		27.603.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (%)	2	4	6	27.603.000,00	8	27.603.000,00	10	27.603.000,00	12	32.000.000,00	14	32.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perindustrian

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
TOTAL KESELURUHAN					5.331.329.000,00		5.592.613.000,00		5.643.019.000,00		6.394.576.000,00		7.899.315.000,00	

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba (Tabel 4.2):

TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
MUSRENBANG RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian							
- Meningkatnya kualitas koperasi dan UMKM	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan IK. Pertumbuhan Ekonomi, Kontribusi PDRB Kabupaten				Rasio Kewirausahaan Daerah		
		Meningkatnya pembinaan dan fasilitasi koperasi dan umkm			Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		
					Proporsi jumlah usaha kecil Non Pertanian pada Level Kabupaten		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Cakupan layanan administrasi keuangan	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kinerja Aparatur		2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang kinerja aparatus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah koperasi yang sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Kualitas SDM perkoperasian		2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
						2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
				Peningkatan Kualitas SDM perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase koperasi yang berkualitas	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
				Jumlah koperasi yang berkualitas	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
					Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	2.17.06.2.01.0008 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
					Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase usaha mikro dan kecil	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Jumlah UMKM yang diberdayakan	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
					Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	
					Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
			Meningkatnya daya saing UMKM	Jumlah wirausaha baru	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah yang Difasilitasi	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
					Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro	
					Jumlah yang Difasilitasi	2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
					Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
		Meningkatnya nilai tambah perdagangan			Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB		
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha		Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor		Nilai Ekspor Barang	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Cakupan layanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kinerja Aparatur		2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang kinerja aparatus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Jumlah tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
					Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.0001 - Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				jumlah laporan pelaku usaha yang menggunakan dan memproduksi bahan berbahaya		3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
						3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
				jumlah laporan pelaku usaha yang menggunakan dan memproduksi bahan berbahaya		3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
						3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
					Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi		Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
				Pasar rakyat yang dibangun dan atau dikelola	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0002 - Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	
				Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
					Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
				Jumlah Barang kadaluarsa dan LPG 3kg	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
				Penanganan dan pengawasan bahan pokok penting di pasar rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
				Jumlah dsitributor dan agen pupuk bersubsidi yang diawasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk		Persentase penanganan pengaduan konsumen	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
				Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
					Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
					Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
			Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	
				Pelaksanaan promosi produk unggulan daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)			
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				
					Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				
		Meningkatnya daya saing industri				Kontribusi PDRB Industri Pengolahan				
					Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Nilai Evaluasi Internal AKIP	2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
					Meningkatnya realisasi pembangunan industri		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		
					Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
								Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
								Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
								Cakupan layanan administrasi gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
					Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kinerja Aparatur				2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
									2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah		Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2.17.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang kinerja aparatus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Dokumen perencanaan dan pembangunan industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	
					Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	
				Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan izin yang sudah dikeluarkan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
					-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	
					Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
				Informasi industri dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.3 Uraian Subkegiatan beserta kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba (Tabel 4.3):

TABEL 4.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH
MUSRENBANG
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	%	12.56	12.56	12.56	12.61	12.66	12.71	12.76	
2	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	%	0	0	25.57	25.57	25.57	25.57	25.57	
3	Persentase koperasi yang berkualitas	%	6.73	6.73	6.73	8.00	8.60	8.90	9.00	
4	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	%	6.63	6.63	6.63	6.83	7.63	7.83	8.63	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Angka	72.00	77.30	79.30	80.90	82.20	83.30	85.00	

TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				5.194.187.110,00		5.278.010.000,00		5.345.813.000,00		5.474.722.000,00		5.879.496.012,00		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.124.075.490,00		5.184.747.490,00		5.260.813.000,00		5.307.722.000,00		5.461.496.012,00		
Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	72.00	79.30	5.124.075.490,00	80.90	5.184.747.490,00	82.20	5.260.813.000,00	83.30	5.307.722.000,00	85.00	5.461.496.012,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Persentase capaian kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5	10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.275.317.000,00		4.315.116.600,00		4.391.939.510,00		4.404.481.800,00		4.405.365.522,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Cakupan layanan administrasi keuangan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	45	4.275.317.000,00	45	4.315.116.600,00	45	4.391.939.510,00	45	4.404.481.800,00	45	4.405.365.522,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.275.317.000,00		4.315.116.600,00		4.391.939.510,00		4.404.481.800,00		4.405.365.522,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35	45	4.275.317.000,00	45	4.315.116.600,00	45	4.391.939.510,00	45	4.404.481.800,00	45	4.405.365.522,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Cakupan Peralatan dan Perlengkapan Kinerja Aparatur				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.04 - Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				101.000.000,00		101.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.660.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah dokumen rencana pengelolaan retribusi daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	101.000.000,00	2	101.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	115.660.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.04.0001 - Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah				101.000.000,00		101.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		115.660.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2	2	101.000.000,00	2	101.000.000,00	2	100.000.000,00	2	100.000.000,00	2	115.660.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	1	2.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				235.258.490,00		241.413.890,00		242.372.490,00		270.739.200,00		369.169.490,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Cakupan layanan administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	11.600.000,00	6	11.600.000,00	6	11.600.000,00	6	7.060.710,00	6	12.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	240	118.533.890,00	240	119.533.890,00	240	119.647.890,00	240	135.553.890,00	240	222.544.890,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	53.124.600,00	4	53.280.000,00	4	53.124.600,00	4	60.124.600,00	4	65.124.600,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	23	30.000.000,00	23	30.000.000,00	23	30.000.000,00	23	40.000.000,00	23	40.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				7.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	7.000.000,00	4	7.000.000,00	4	8.000.000,00	4	8.000.000,00	4	9.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	23	23	30.000.000,00	23	30.000.000,00	23	30.000.000,00	23	40.000.000,00	23	40.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				11.600.000,00		11.600.000,00		11.600.000,00		7.060.710,00		12.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6	6	11.600.000,00	6	11.600.000,00	6	11.600.000,00	6	7.060.710,00	6	12.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				53.124.600,00		53.280.000,00		53.124.600,00		60.124.600,00		65.124.600,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	4	53.124.600,00	4	53.280.000,00	4	53.124.600,00	4	60.124.600,00	4	65.124.600,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4	4	15.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				118.533.890,00		119.533.890,00		119.647.890,00		135.553.890,00		222.544.890,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	240	240	118.533.890,00	240	119.533.890,00	240	119.647.890,00	240	135.553.890,00	240	222.544.890,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				5.000.000,00		6.716.000,00		6.000.000,00		12.000.000,00		10.800.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	2.716.000,00	1	2.000.000,00	1	8.000.000,00	1	6.800.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	1	2.000.000,00	1	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2	2.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000,00		2.716.000,00		2.000.000,00		8.000.000,00		6.800.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	2.716.000,00	1	2.000.000,00	1	8.000.000,00	1	6.800.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0	0	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				415.000.000,00		428.001.000,00		428.001.000,00		428.001.000,00		428.001.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5	399.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	16.000.000,00	12	28.001.000,00	12	28.001.000,00	12	28.001.000,00	12	28.001.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				16.000.000,00		28.001.000,00		28.001.000,00		28.001.000,00		28.001.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	16.000.000,00	12	28.001.000,00	12	28.001.000,00	12	28.001.000,00	12	28.001.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				399.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	5	399.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	5	400.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		90.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terpeliharanya barang milik daerah penunjang kinerja aparatus	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	60.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	70	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		60.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	4	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	40.000.000,00	4	60.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	50	10.000.000,00	70	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.12 - Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.13 - Penataan Organisasi				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.14 - Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.15 - Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.01.2.16 - Layanan Administrasi DPRD				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	12.56	12.56	5.000.000,00	12.61	2.000.000,00	12.66	5.000.000,00	12.71	5.000.000,00	12.76	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
jumlah koperasi yang telah dilakukan pemeriksaan dan pengawasan	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	10	5.000.000,00	10	2.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	10	10	5.000.000,00	10	2.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.000.000,00	10	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				5.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	28.57	28.57	5.000.000,00	28.57	2.000.000,00	28.57	3.000.000,00	28.57	3.000.000,00	28.57	4.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah koperasi yang sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.1	2.1	5.000.000,00	2.1	2.000.000,00	2.3	3.000.000,00	2.5	3.000.000,00	2.7	4.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				5.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	2.1	2.1	5.000.000,00	2.1	2.000.000,00	2.3	3.000.000,00	2.5	3.000.000,00	2.7	4.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Peningkatan Kualitas SDM perkoperasian				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				16.111.620,00		35.262.510,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten	12.56	12.56	16.111.620,00	12.61	35.262.510,00	12.66	25.000.000,00	12.71	25.000.000,00	12.76	25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota				16.111.620,00		35.262.510,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Peningkatan Kualitas SDM perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	25	16.111.620,00	25	35.262.510,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				16.111.620,00		35.262.510,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	50	25	16.111.620,00	25	35.262.510,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	25	25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.05.2.02 - Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.05.2.03 - Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				5.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00		29.000.000,00		
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	6.73	6.73	5.000.000,00	8.00	12.000.000,00	8.60	12.000.000,00	8.90	24.000.000,00	9.00	29.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00		29.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah koperasi yang berkualitas	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0.0	10	5.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	24.000.000,00	10	29.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01.0003 - Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				5.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		24.000.000,00		29.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	0.0	10	5.000.000,00	10	12.000.000,00	10	12.000.000,00	10	24.000.000,00	10	29.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.06.2.01.0006 - Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01.0008 - Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				9.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase usaha mikro dan kecil	1.8	1.00	9.000.000,00	1.20	12.000.000,00	1.30	10.000.000,00	1.40	10.000.000,00	1.50	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				9.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah UMKM yang diberdayakan	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0.0	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terasilitasi			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0.0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	5	5	2.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	0.0	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	5.000.000,00	2	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				2.000.000,00		2.000.000,00		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	0.0	3	2.000.000,00	3	2.000.000,00	0	-	0	-	0	-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07.2.01.0013 - Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik				-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			-		-		-		-			2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	5	5	2.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya daya saing UMKM	Meningkatnya usaha kecil yang menjadi wirausaha	6.63	6.63	30.000.000,00	6.83	30.000.000,00	7.63	30.000.000,00	7.83	100.000.000,00	8.63	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah wirausaha baru	Jumlah yang Difasilitasi			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	10	100.000.000,00	20	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				30.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		100.000.000,00		300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	5	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	5	30.000.000,00	10	100.000.000,00	20	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				105.538.890,00		246.000.000,00		228.603.000,00		792.854.000,00		1.892.818.988,00		
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	Persentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	34.77	34.77	5.000.000,00	34.87	10.000.000,00	34.97	10.000.000,00	35.07	15.000.000,00	35.17	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
jumlah laporan pelaku usaha yang menggunakan dan memproduksi bahan berbahaya				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah tanda daftar gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang				5.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	1	1	5.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.02.2.06 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
jumlah laporan pelaku usaha yang menggunakan dan memproduksi bahan berbahaya				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN				19.538.890,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		379.390.400,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	12.50	12.50	19.538.890,00	12.50	25.000.000,00	12.50	25.000.000,00	12.50	50.000.000,00	12.50	379.390.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				19.538.890,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		379.390.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Pasar rakyat yang dibangun dan atau dikelola	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03.2.01.0002 - Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03.2.01.0003 - Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	19.538.890,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	50.000.000,00	10	379.390.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan				19.538.890,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		379.390.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3	3	19.538.890,00	3	25.000.000,00	3	25.000.000,00	3	50.000.000,00	10	379.390.400,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING				36.000.000,00		71.000.000,00		61.000.000,00		71.000.000,00		101.000.000,00		
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	96.75	96.75	36.000.000,00	96.75	71.000.000,00	96.75	61.000.000,00	96.75	71.000.000,00	96.75	101.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota				5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah Barang kadaluarsa dan LPG 3kg	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat				5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	1	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				25.000.000,00		60.000.000,00		50.000.000,00		60.000.000,00		90.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Penanganan dan pengawasan bahan pokok penting di pasar rakyat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	0	-	1	35.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	65.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				-		35.000.000,00		25.000.000,00		35.000.000,00		65.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1	0	-	1	35.000.000,00	1	25.000.000,00	1	35.000.000,00	1	65.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah dsitributor dan agen pupuk bersubsidi yang diawasi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00		5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	1	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	1	5.500.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR				-		50.000.000,00		42.603.000,00		216.854.000,00		357.428.588,00		
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang	0	0	-	1	50.000.000,00	1	42.603.000,00	1	216.854.000,00	1	357.428.588,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				-		50.000.000,00		42.603.000,00		216.854.000,00		357.428.588,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
jumlah pelaku usaha yang berorientasi ekspor pada pameran dagang nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	0	-	20	17.603.000,00	20	17.603.000,00	20	184.457.000,00	20	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	0	-	10	32.397.000,00	10	25.000.000,00	10	32.397.000,00	10	57.428.588,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional				-		32.397.000,00		25.000.000,00		32.397.000,00		57.428.588,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	0	0	-	10	32.397.000,00	10	25.000.000,00	10	32.397.000,00	10	57.428.588,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
3.30.05.2.01.0003 - Pameran Dagang Lokal				-		17.603.000,00		17.603.000,00		184.457.000,00		300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	0	0	-	20	17.603.000,00	20	17.603.000,00	20	184.457.000,00	20	300.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian		
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen	42.75	42.75		40.000.000,00	42.75	40.000.000,00	42.75	40.000.000,00	43.00	40.000.000,00	43.25	40.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan					40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Jumlah UTTP yang ditera dan ditera ulang	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100	0	-	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100	100	40.000.000,00	110	35.000.000,00	110	35.000.000,00	110	35.000.000,00	112	35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang				40.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	100	100	40.000.000,00	110	35.000.000,00	110	35.000.000,00	110	35.000.000,00	112	35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal				-		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	100	0	-	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	30	5.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI				5.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00		
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan	0	0	5.000.000,00	25	50.000.000,00	50	50.000.000,00	75	400.000.000,00	100	1.000.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri				5.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		400.000.000,00		1.000.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Pelaksanaan promosi produk unggulan daerah	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	0	-	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	8	100.000.000,00	14	200.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7	10	5.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	300.000.000,00	10	800.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				5.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		300.000.000,00		800.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	7	10	5.000.000,00	10	25.000.000,00	10	25.000.000,00	10	300.000.000,00	10	800.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.30.07.2.01.0006 - Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				-		25.000.000,00		25.000.000,00		100.000.000,00		200.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	0	0	-	2	25.000.000,00	2	25.000.000,00	8	100.000.000,00	14	200.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				31.603.000,00		68.603.000,00		68.603.000,00		127.000.000,00		127.000.000,00		
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				4.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	7.27	7.27	4.000.000,00	7.35	25.000.000,00	7.43	25.000.000,00	7.51	65.000.000,00	7.58	65.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				4.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Dokumen perencanaan dan pembangunan industri	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	3	2.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	10	2.000.000,00	2	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				2.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	0	10	2.000.000,00	2	10.000.000,00	10	10.000.000,00	10	30.000.000,00	10	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				2.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3	3	2.000.000,00	3	15.000.000,00	3	15.000.000,00	4	35.000.000,00	4	35.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02.2.01.0006 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.02.2.01.0008 - Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota				-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan			-		-		-		-		-	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				-		16.000.000,00		16.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100	100	-	100	16.000.000,00	100	16.000.000,00	100	30.000.000,00	100	30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota				-		16.000.000,00		16.000.000,00		30.000.000,00		30.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan izin yang sudah dikeluarkan	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	1	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemuenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	1	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota				-		8.000.000,00		8.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	1	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
3.31.03.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)				-		8.000.000,00		8.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	0	1	-	1	8.000.000,00	1	8.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				27.603.000,00		27.603.000,00		27.603.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	2	2	27.603.000,00	2	27.603.000,00	2	27.603.000,00	2	32.000.000,00	2	32.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota				27.603.000,00		27.603.000,00		27.603.000,00		32.000.000,00		32.000.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Informasi industri dan evaluasi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	14.397.000,00	4	14.397.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.04.2.01.0001 - Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				17.603.000,00		17.603.000,00		17.603.000,00		17.603.000,00		17.603.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	4	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	4	17.603.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		14.397.000,00		14.397.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	
Terantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	4	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	10.000.000,00	4	14.397.000,00	4	14.397.000,00	2.17.3.30.3.31.01.00 00 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	

4.4 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Uraian Subkegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba (Tabel 4.4)::

**TABEL 4.4 DAFTAR SUBKEGIATAN PRIORITAS DALAM MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN DAERAH MUSRENBANG RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
			2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
2.	2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Meningkatnya kualitas koperasi	2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
4.	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			2.17.06.2.01.0004 - Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
5.	2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya pemberdayaan usaha dan usaha mikro	2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
			2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
			2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
6.	2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya kapasitas Usaha mikro	2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
			2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
7.	3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	3.30.02.2.02 - Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
			3.30.02.2.02.0001 - Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	
8.	3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	3.30.03.2.01 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
			3.30.03.2.01.0001 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	
9.	3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04.2.01 - Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	
			3.30.04.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	
			3.30.04.2.02 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.02.0002 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	
			3.30.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.03 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			3.30.04.2.03.0003 - Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	
10.	3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	3.30.05.2.01 - Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
			3.30.05.2.01.0002 - Pameran Dagang Nasional	
11.	3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	3.30.06.2.01 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	
			3.30.06.2.01.0001 - Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
			3.30.06.2.01.0002 - Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	
12.	3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07.2.01 - Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
			3.30.07.2.01.0005 - Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
13.	3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya realisasi pertumbuhan industri	3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
			3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
14.	3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	
15.	3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
			3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	

4.5 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 4.5 :

TABEL 4.5 INDIKATOR KINERJA UTAMA
MUSRENBANG RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.17.3.30.3.31.01.0000 - Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian									
2.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Persentase	12,56	12,56	12,56	12,61	12,66	12,71	12,76	
3.	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	(%)	19,28	19,28	8,12	8,2	8,28	8,36	8,44	

4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel 4.6 :

TABEL 4.6 INDIKATOR KINERJA KUNCI
RANCANGAN AKHIR RENSTRA
PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										
2.	Persentase koperasi yang berkualitas	positif	%	6,73	6,73	6,73	8	8,6	8,9	9	
3.	Persentase usaha mikro dan kecil	positif	%	1,8	1,8	1	1,2	1,3	1,4	1,5	
4.	Persentase usaha mikro menjadi wirausaha	positif	%	6,63	6,63	6,63	6,83	7,63	7,83	8,63	
5.	3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										
6.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	negatif	%	2,39	2,37	2,35	2,33	2,31	2,29	2,27	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	positif	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Pertumbuhan industri	positif	%	7,27	7,27	0	7,35	7,43	7,51	7,58	
10.	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	komulatif	%	2	4	6	8	10	12	14	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah Dokumen Perencanaan Bidang/Urusan Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba untuk periode 5 (lima) tahun dimulai tahun 2025 – 2029. Renstra ini disusun untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Kabupaten Toba yang telah di spesifikasi dan disepakati dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2029.

Sasaran, Program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Toba.

Hal strategis yang menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba. Karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba merupakan solusi yang

paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan perikanan atau target kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba. Laporan Kinerja (LAKIP) itu akan menjadi bukti pencapaian kinerja dan bahan perbaikan pencapaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 semoga dapat memberikan manfaat yang berguna bagi kemajuan pembangunan di Kabupaten Toba, dan mampu mendorong dalam pencapaian visi Pemerintah Kabupaten Toba Tahun 2025–2029.

Balige, September 2025
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN TOBA

Drs. SALOMO H. K. SIMANJUNTAK
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680601 198903 1 004